



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT
2025

RENSTRA

Dinas Kesehatan

Provinsi Papua Barat
2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025 – 2029 telah dapat disusun dengan baik. Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025 – 2029 ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Di dalamnya memuat pula sasaran kegiatan/sub kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam semua penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih. Semoga Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 2025 – 2029 sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Manokwari, 10 Oktober 2025
**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

dr. ALWAN RIMOSAN, Sp.B.FINACS
Pembina Tk.I
NIP. 196910272000121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1	LATAR BELAKANG	I-1
1.2	DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-2
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	I-4
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.2	SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	II-9
2.3	KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-13
2.4	KELOMPOK SASARAN LAYANAN	II-19
2.5	MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN	II-19
2.6	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-20

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1	TUJUAN DAN SASARAN	III-1
3.2	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	III-5

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	IV-1
4.2	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-31

BAB V PENUTUP

5.1	KAIDAH PELAKSANAAN DAN PENGEDALIAN EVALUASI	V-1
-----	---	-----

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

A DAFTAR TABEL

2.1	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat	II-13
2.2	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat	II-14
2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	II-18
2.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-22
3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	III-4
3.2	Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2025 – 2029	III-6
3.3	Arah Kebijakan Dinas Kesehatan 2025-2029	III-7
4.1	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan	IV-10
4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan	IV-18
4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-29
4.4	Indikator Kinerja Utama PD	IV-32
4.5	Indikator Kinerja Kunci	IV-33

B DAFTAR GAMBAR

2.1	Struktur Organisasi	II-2
2.2	Persentase PNS menurut Golongan	II-9
2.3	Persentase PPPK menurut Golongan	II-10
2.4	Persentase PNS menurut Jenjang Pendidikan	II-10
2.5	Persentase PPPK menurut Jenjang Pendidikan	II-11
2.6	Persentase PNS menurut Jenis Kelamin	II-11
2.7	Persentase PPPK menurut Jenis Kelamin	II-12
3.1	Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2026- 2029	III-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan dalam struktur organisasi yang ada. Pemikiran yang mendasari konsep perencanaan strategis adalah menghubungkan isu-isu strategis yang ada dengan tujuan yang ingin dicapai dengan dukungan serta konstrain sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, keuangan dan peralatan serta fasilitas terkait. Perencanaan strategis sedapat mungkin juga perlu melibatkan para pemangku kepentingan yang luas untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai dalam waktu yang ditentukan; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Secara legal formal, penyusunan dan penetapan RENSTRA-Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 - 2029 merupakan bagian terintegrasi dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat tahun 2025 - 2029, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 205 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Sedangkan untuk sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
4. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
5. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, **Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat** berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam horizon waktu tahun 2025 - 2029. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi Papua Barat untuk periode tahun 2025 - 2029.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025 - 2029 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Provinsi Papua;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan Pengelolaan Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 111);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomot 40, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 143).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Kesehatan Papua Barat adalah merancang perencanaan strategis pembangunan di bidang urusan wajib pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar selama periode tahun 2025 - 2029, yang selanjutnya berfungsi untuk :

- 
1. Menjadi dasar acuan bagi penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di bidang kesehatan
 2. Pedoman strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah di bidang urusan wajib pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan amanat Tugas Pokok dan Fungsi yang ditetapkan
 3. Penjabaran dan uraian teknis dokumen perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Papua Barat tahun 2025 - 2029 di tingkat urusan kewenangan dan organisasi perangkat daerah

Sedangkan **Tujuan** Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah ini adalah Merancang komponen-komponen perencanaan strategis Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Papua Barat tahun 2025 - 2029, yaitu :

1. Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang mengemuka di bidang kesehatan ;
2. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah di bidang urusan wajib pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Merancang strategi dan arah kebijakan pembangunan di bidang urusan wajib pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
4. Merumuskan Program, Kegiatan, subkegiatan dan plafon anggaran pembangunan daerah yang responsif terhadap permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah di bidang urusan wajib pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
5. Menetapkan target kinerja pembangunan daerah di bidang urusan wajib pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar selama periode Tahun 2025 - 2029.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat disusun melalui sistematika sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat**, Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas mengenai sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, kelompok sasaran layanan dan mengulas permasalahan dan isu strategis yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan** berisi tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
- BAB IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, mengemukakan uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- BAB V. Penutup**, berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Dinas Kesehatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian, dan 15 (lima belas) Seksi.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang Kesehatan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempunyai fungsi :

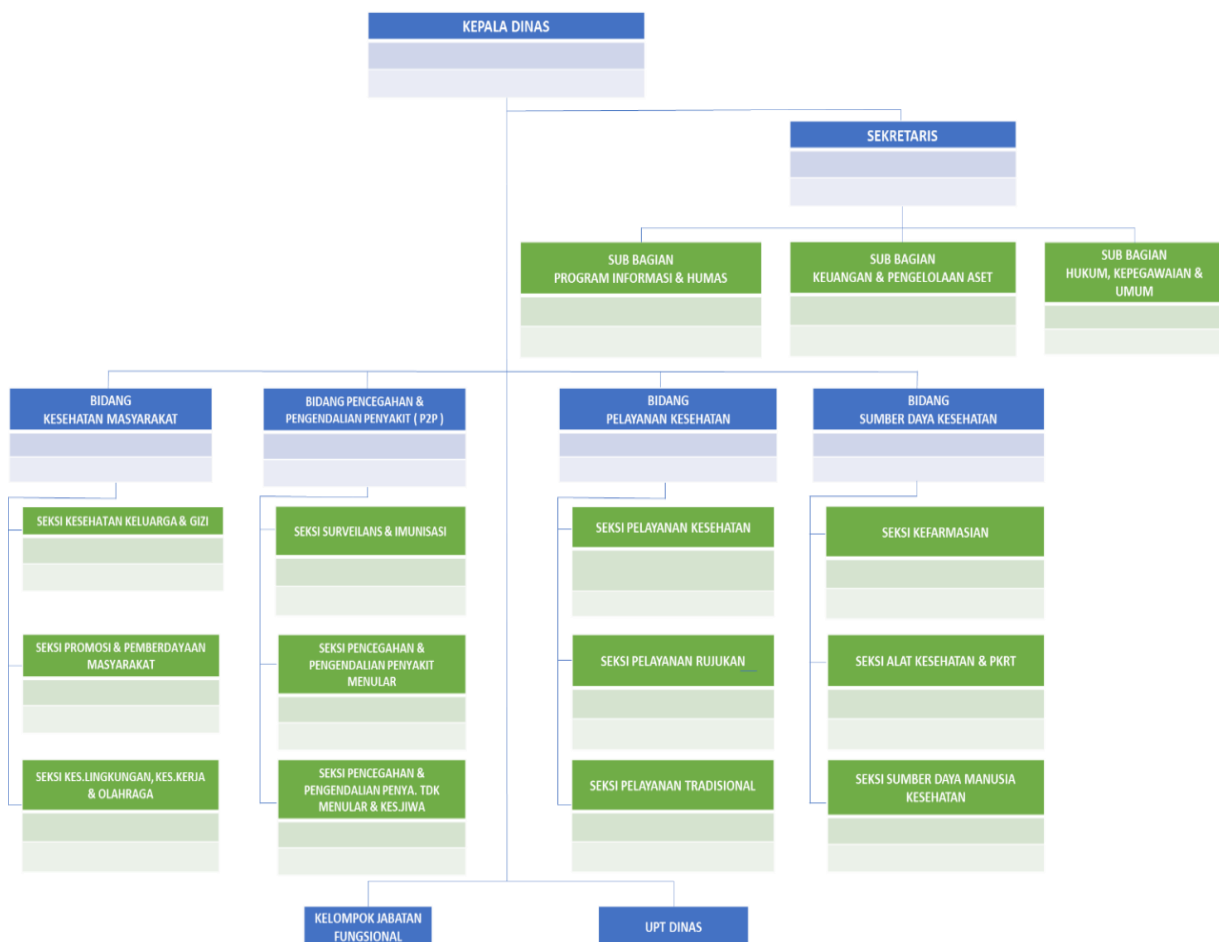
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis;

- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas kesehatan Provinsi Papua Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



Struktur Dinas Kesehatan Papua Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, Terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program Informasi Dan Humas;
 - 2) Subbagian Keuangan & Pengelolaan Aset
 - 3) Subbagian Hukum, Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Keluarga & Gizi
 - 2) Seksi Promosi & Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Seksi Kes Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- d. Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit (P2P), terdiri dari :
 - 1) Seksi Surveilans & Imunisasi
 - 2) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
 - 3) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi pelayanan Kesehatan Tradisional.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kefarmasian
 - 2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Alat Rumah Tangga
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2.1.3 Uraian Tugas

Pembentukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Uraian Tugas Dan



Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 5) Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis;
 - 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumah tanggaan dan kepegawaian, dimana Sekretariat Dinas Kesehatan Papua Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

 - 1) Penyusunan rencana dan program kerja sekretariat;
 - 2) Pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas Kesehatan;
 - 3) Pengkoordinasian penyusunan dan penyajian data statistic lingkup Dinas Kesehatan;
 - 4) Pengelolaan Administrasi Dinas Kesehatan;
 - 5) Pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas Kesehatan;
 - 6) Pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas Kesehatan;
 - 7) Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas Kesehatan;

- 
- 8) Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas Kesehatan;
 - 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
 - 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat; dan
 - 11) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas dan fungsi :
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perkoordinasian, monitoring evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Kesehatan masyarakat tingkat daerah provinsi, dimana Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- 1) Penyusunan rencana Bidang;
 - 2) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesehatan masyarakat;
 - 3) Penyampaian bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Kesehatan masyarakat;
 - 4) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - 5) Penyiapan pelaksanaan kebijaksanaan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan olahraga;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan olahraga;

- 
- 7) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kesehatan dan promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan olahraga;
 - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang, dan
 - 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai tugas dan fungsi :
- Tugas dari Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pencegahan pengendalian penyakit tingkat daerah provinsi, dimana Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana kerja bidang;
 - 2) Penyiapan bahan pelaksanaan dan rumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - 4) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang survailans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa;
 - 5) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa;

- 
- 6) Pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa;
 - 7) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa;
 - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
 - 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas dan fungsi :
- Tugas Bidang Pelayanan Kesehatan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pelayanan Kesehatan tingkat daerah provinsi, dimana Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
- 1) Penyusunan rencana kerja bidang;
 - 2) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan;
 - 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelayanan Kesehatan;
 - 4) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
 - 5) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan Kesehatan primer, rujukan, dan tradisional;
 - 7) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan Kesehatan primer, rujukan dan tradisional;

- 
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
 - 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai tugas dan fungsi :
- Tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan sumber daya kesehatan tingkat daerah provinsi, dimana Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
- 1) Penyusunan rencana kerja bidang;
 - 2) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sumber daya kesehatan;
 - 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sumber daya kesehatan;
 - 4) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan dan sumber daya manusia Kesehatan;
 - 5) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan dan sumber daya manusia Kesehatan;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan dan sumber daya manusia Kesehatan;
 - 7) Pelaksanaan bimbingan teknis dan survepsi di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan dan sumber daya manusia Kesehatan;
 - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
 - 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah dibentuk UPTD-IFP yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD-IFP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD-IFP menyelenggarakan fungsi :

- 1) perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemantauan dan evaluasi Sediaan Farmasi , BMHP dan perbekalan kesehatan yang diperlukan oleh pelayanan kesehatan;
- 2) pengelolaan dan pendistribusian Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan;
- 3) penyusunan analisis kebutuhan, pencatatan dan pelaporan persediaan dan Mutasi Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan;
- 4) pengamatan mutu/kualitas Persediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- 5) monitoring dan evaluasi penggunaan Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan serta melakukan pembinaan pada unit pelayanan kesehatan;
- 6) penyusunan standar dan prosedur pengelolaan Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD-IFP dibantu oleh :

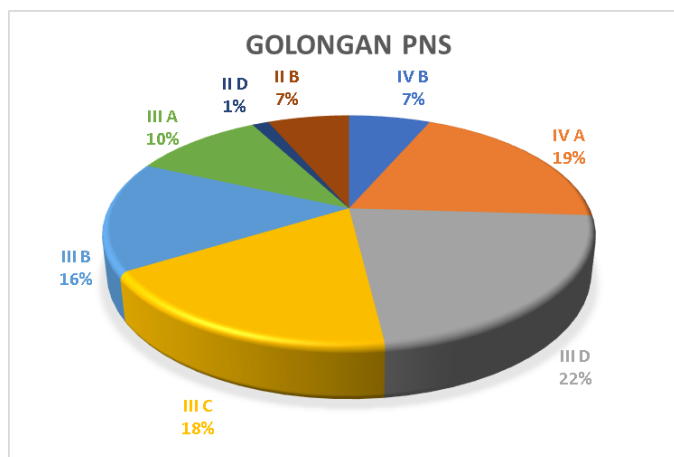
- 1) Subbagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Analisis, Penerimaan, Distribusi dan Pengamanan;
- 3) Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan dan Penyiapan; dan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 80 orang, CPNS sebanyak 8 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja sebanyak 8 orang. Berikut adalah jumlah SDM menurut Golongan, Eselon, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Kelamin :

- a. Jumlah PNS Dinas Kesehatan menurut Golongan : Golongan-IV.b berjumlah 5 orang, Golongan-IV.a : 15 orang, Golongan-III.d : 17 orang, Golongan-III.c : 14 orang, Golongan-III.b : 12 orang, Golongan-III.a : 8 orang, Golongan-II.d : 1 orang, dan Golongan-II.b : 5 orang



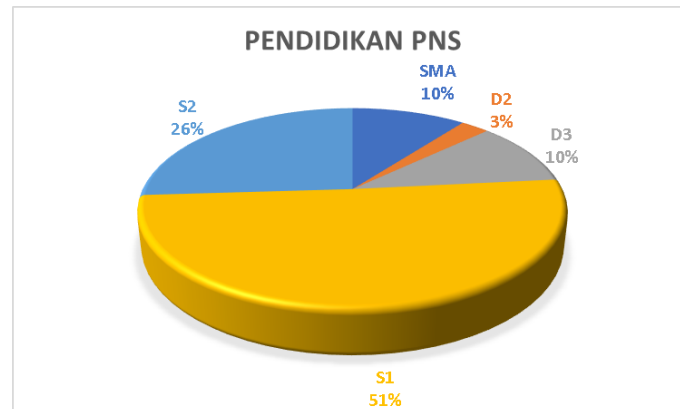
Gambar 2.2 Persentase PNS menurut Golongan

- b. Jumlah PPPK Dinas Kesehatan menurut Golongan : Golongan-V berjumlah 3 orang, dan Golongan-IX berjumlah 4 orang



Gambar 2.3 Persentase PPPK menurut Golongan

- c. Jumlah PNS Dinas Kesehatan menurut jenjang Pendidikan : Strata-II (S2) berjumlah 20 Orang, Strata-I (S1) berjumlah 39 orang, Diploma-III (D3) berjumlah 8 orang, dan SMA/Sederajat berjumlah 8 orang.



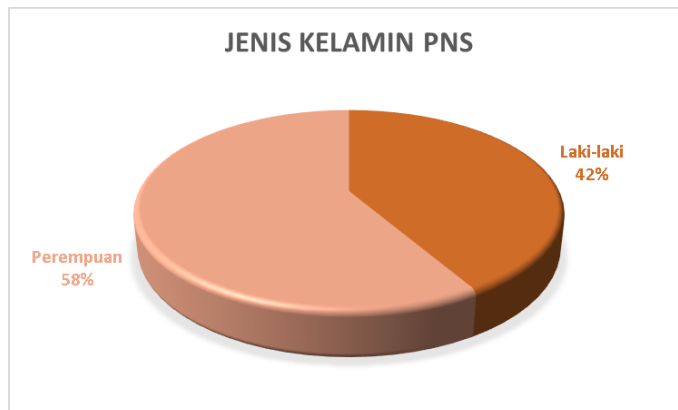
Gambar 2.4 Persentase PNS menurut Jenjang Pendidikan

- d. Jumlah PPPK Dinas Kesehatan menurut jenjang Pendidikan : Strata-I (S1) berjumlah 3 Orang dan SMA/Sederajat berjumlah 4 orang



Gambar 2.5 Persentase PPPK menurut Jenjang Pendidikan

- e. Jumlah PNS Dinas Kesehatan menurut Jenis Kelamin : Laki-laki berjumlah 32 orang, dan Perempuan berjumlah 45 orang.



Gambar 2.6 Persentase PNS menurut Jenis Kelamin

- f. Jumlah PPPK Dinas Kesehatan menurut Jenis Kelamin : Laki-laki berjumlah 3 orang, dan Perempuan berjumlah 4 orang.



Gambar 2.7 Persentase PPPK menurut Jenis Kelamin

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Kesehatan Papua Barat memiliki sarana/ Prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Operasional Dinas Kesehatan, sarana dan prasarana tersebut berupa Gedung, Gudang, Mobil (Mobil Operasional Ambulance). Kegiatan Operasional Dinas kesehatan Papua Barat dilaksanakan di :

- 1) Kantor Utama / Gedung Induk terletak di Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat, Jalan Brigjen (Purn) Abraham O. Ataruri, Arfai, Manokwari.

- 
- 2) UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Papua Barat terletak di Jalan Brigjen (Purn) Abraham O. Ataruri, Arfai, Manokwari.
 - 3) RSUD Provinsi Papua Barat terletak di Kompleks Irman Jaya, Jalan Angkasa Mulyono, Amban, manokwari.

Sarana Penunjang Kegiatan Pelayanan yang dimiliki Oleh Dinas Kesehatan Papua Barat antara lain :

- 1) 5 Unit Ambulance (2 di RSUD Provinsi dan 3 di Dinkes);
- 2) 15 Unit Mobil Dinas/ Operasional (4 di RSUD Provinsi, 11 di Dinkes)
- 3) 25 Unit Motor/ Kendaraan Operasional (13 di Dinkes, 12 di RSUD Provinsi)
- 4) 77 Unit Laptop (8 di RSUD Provinsi, 69 di Dinkes)
- 5) 31 Unit Personal Computer/ PC (25 unit di dinkes, 6 unit di UPTD)

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator pelayanan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat periode Renstra Tahun 2023-2026 dimana pencapaian Indikator-indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

**Tabel 2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Papua Barat**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio (%)			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,04	66,31	66,57	66,84	68,51	68,47	-	-	104%	103%	-	-
2	Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas	Persen	75,50%	83,11%	91,32%	100%	76%	79,07%	-	-	101%	95%	-	-
3	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	Per 1000 penduduk	10,5	10,55	11	11	10,61	10,82	-	-	101%	103%	-	-
4	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%	Persen	100%	100%	100%	100%	84,21%	70,83%	-	-	84%	71%	-	-
5	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persen	46,15%	61,54%	79,92%	100%	42,85%	42,85%	-	-	93%	70%	-	-
6	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	26%	22%	18%	14%	13,67%	14,73%	-	-	53%	67%	-	-
7	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	8,50%	7,50%	7,20%	6,90%	8,83%	10%	-	-	104%	133%	-	-

**Tabel 2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Papua Barat**

No	Indikator Kinerja Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio (%)			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	2,00	2,10	2,20	2,30	1,8	1,79	-	-	90,00%	85,24%	-	-
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	-	-	100,00%	100,00%	-	-
3	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100	93,33	-	-	100,00%	93,33%	-	-
4	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100	97,14	-	-	100,00%	97,14%	-	-
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	85,61	70,28	59,98	45,41	137,93	175,82	-	-	161,11%	250,17%	-	-
6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	9,51	8,90	8,31	7,72	4,70	8,79	-	-	49,42%	98,76%	-	-
7	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	35,00	50,00	75,00	95,00	85	87	-	-	242,86%	174,00%	-	-
8	Prevalensi HIV	3,00	2,50	2,00	1,50	2,30	2,30	-	-	76,67%	92,00%	-	-
9	Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	9,00	8,00	7,00	6,00	13,00	12,27	-	-	144,44%	153,38%	-	-
10	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	65,00	80,00	95,00	100,00	95,00	89,00	-	-	146,15%	111,25%	-	-
11	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00%	-	-
12	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	100,00	100,00	100,00	100,00	Tidak ada UKOT	Tidak ada UKOT	-	-	-	-	-	-
13	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	20,00	35,00	55,00	75,00	19	24,05	-	-	95,00%	68,71%	-	-
14	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	2,00	4	6	7	7	6	-	-	350,00%	150,00%	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio (%)			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
15	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	100,00	100,00	100,00	100,00	100	92,14	-	-	100,00%	92,14%	-	-
16	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi	20,00	40,00	60,00	80,00	28,57	100	-	-	142,85%	250,00%	-	-
17	Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	25,00	45,00	65,00	85,00	57,14	100	-	-	228,56%	222,22%	-	-
18	Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	55,00	65,00	75,00	85,00	14,29	14,29	-	-	25,98%	21,98%	-	-
19	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	1,00	1	2,00	2,00	1	1	-	-	100,00%	100,00%	-	-
20	Capaian Universal Health Coverage (UHC)	100,00	100,00	100,00	100,00	111,57	107,26	-	-	111,57%	107,26%	-	-
21	Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	44,29	45,40	46,53	47,70	14,28	36,25	-	-	32,24%	79,85%	-	-
22	Persentase Puskesmas Tersedia Obat Esensial	55,00	70,00	85,00	100,00	84,21	70,83	-	-	153,11%	101,19%	-	-
23	Persentase FKTP Terakreditasi	50,00	55,00	60,00	65,00	56,57	92,5	-	-	113,14%	168,18%	-	-
24	Jumlah Kematian Jemaah Haji	0,00	0,00	0,00	0,00	2	1	-	-	0,00%	0,00%	-	-
25	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak yang dilaksanakan	3,00	3,00	3,00	3,00	5	4	-	-	166,67%	133,33%	-	-
26	Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	50,00	55,00	60,00	65,00	23	69,1	-	-	46,00%	125,64%	-	-
27	Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	29,00	30	35,00	40,00	18	26	-	-	62,07%	86,67%	-	-
28	Persentase Status Aktif Kepesertaan JKN-KIS	90,00	95,00	100,00	100,00	95,63	96,1	-	-	106,26%	101,16%	-	-
29	Persentase Posyandu Aktif (Posyandu Buka Layanan dan Melaporkan Kegiatan Posyandu)	75,00	80,00	90,00	100,00	33,9	41,86	-	-	45,20%	52,33%	-	-
30	Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	2,00	4	6,00	7,00	6	3	-	-	300,00%	75,00%	-	-



Berdasarkan data kinerja yang tersaji pada tabel 2.1 untuk Indikator Kinerja Utama perangkat daerah, pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten telah dilaksanakan selama Tahun 2023 s.d 2024 dengan baik, terjadi peningkatan angka harapan hidup dari Tahun 2023 – 2024 yang mengindikasikan terjadi peningkatan status Kesehatan masyarakat. Dari segi ketersediaan akses dan mutu pelayanan Kesehatan, terdapat peningkatan jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas pada Tahun 2024 di Papua Barat walaupun jumlahnya belum mencapai 100%, hal ini menjadi perhatian dalam upaya memastikan pada periode renstra 2025 -2029 agar target indikator ini dapat terpenuhi dalam menunjang aksesibilitas dan kualitas pelayanan Kesehatan hingga ke wilayah kecamatan. Dalam hal ketersediaan tenaga medis tenaga Kesehatan, terdapat peningkatan rasio tenaga Kesehatan pada Tahun 2024 dibandingkan Tahun sebelumnya, namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum maksimal terpenuhi, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

Ketersediaan obat esensial terutama di fasilitas layanan dasar masih belum merata di semua Puskesmas. Proses pengadaan obat yang terhambat baik karena handling cost yang lebih besar yang disebabkan karena faktor geografis sehingga penyedia e-catalog enggan menyetujui pesanan terutama bila jumlah pesanan sedikit maupun rencana pengadaan yang tidak sesuai rencana kebutuhan obat yang memprioritaskan ketersediaan obat esensial, menjadi permasalahan hampir di semua kabupaten di Provinsi Papua Barat. UPTD Instalasi farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sesuai Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 4 April 2024, merupakan bentuk keseriusan Dinas Kesehatan dalam peningkatan capaian kinerja terutama pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai (bmhp) dan perbekalan Kesehatan. UPTD Instalasi Farmasi merupakan unit yang sangat penting dengan tugas pokok melaksanakan penerimaan, pemeliharaan, pendistribusian, pencatatan, pendataan, pengawasan terkait ketersediaan dan penggunaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan.

Dalam hal upaya penerapan kebijakan Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), capaian masih belum merata di semua Kabupaten disebabkan antara lain masih terdapat Kabupaten yang belum memiliki atau menerbitkan kebijakan Germas dan/atau kebijakan



berwawasan Kesehatan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.

Indikator kinerja lain yang merupakan prioritas adalah penurunan prevalensi stunting, dimana mengalami penurunan pada Tahun 2024 namun relative kecil yaitu 0,2 % dan masih diatas rata-rata nasional. Provinsi Papua Barat terus berupaya meningkatkan capaian dan kinerja dalam hal pelaporan dan penginputan data hasil capaian indikator dalam e-PPGBM di tingkat Kabupaten termasuk dukungan sumber daya manusia, dana dan peningkatan tenaga terlatih. Selain tantangan dalam masalah pelaporan, Papua Barat juga masih dihadapkan dengan tantangan lainnya antara lain yaitu asupan gizi dan status kesehatan yang meliputi ketahanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi), lingkungan sosial (norma, makanan bayi dan anak, hygiene, pendidikan, dan tempat kerja), lingkungan kesehatan (akses, pelayanan preventif dan kuratif), dan lingkungan pemukiman (air, sanitasi, kondisi bangunan). Untuk mengatasi stunting, diperlukan komitmen dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Pada tabel 2.2, terdapat 30 indikator kinerja kunci Dinas Kesehatan. Mayoritas kinerja mengalami peningkatan atau rasio peningkatan lebih tinggi dibandingkan Tahun sebelumnya. Capaian Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 100% dan persentase status aktif kepesertaan JKN mencapai 96%, persentase FKTP terakreditasi juga mengalami peningkatan di Tahun 2024 dibanding sebelumnya dan pencapaian SPM Provinsi cukup tinggi dan akan diupayakan mencapai 100% pada periode renstra berikutnya terutama pada aspek mutu (kualifikasi dan kuantitas jasa/tenaga medis tenaga Kesehatan yang terlibat dalam pencapaian indikator SPM). Beberapa indikator yang masih belum menunjukkan pencapaian optimal seperti Angka kematian Ibu, angka kematian bayi prevalensi HIV dan API yang masih > 1 per 1000 penduduk, serta indikator lain yang masih belum mencapai target akan ditingkatkan pencapaiannya dengan kolaborasi dan sinergisme bersama Kabupaten dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Papua Barat.

Capaian kinerja periode Tahun 2023 – 2026 tentunya dipengaruhi oleh faktor anggaran dan masih perlunya peningkatan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada beberapa indikator yang belum mencapai target daerah maupun nasional, berikut ini adalah postur anggaran dan realisasi beserta rasio pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat periode Renstra Tahun 2023-2026 tersaji pada tabel 2.3 :

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat**

Uraian Pendapatan,	Anggaran pada Tahun ke- (.000)				Realisasi pada Tahun ke- (.000)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-12	-13	-14	-15	-17	-18
BELANJA DAERAH														
Belanja Pegawai	Rp 20.375.931.653,00	Rp 36.929.926.048,00	Rp 65.999.667.000,00	Rp -	Rp 13.074.041.855,00	Rp 34.491.658.885,00	Rp -		64,16	93,40	-	-	Rp 41.101.841.567,00	Rp 23.782.850.370,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 75.882.539.674,00	Rp 44.718.777.946,00	Rp 103.689.963.436,00	Rp -	Rp 62.675.905.850,00	Rp 38.418.854.603,00	Rp -		82,60	85,91	-	-	Rp 74.763.760.352,00	Rp 50.547.380.226,50
Belanja Modal	Rp 95.477.506.435,00	Rp 19.643.302.273,00	Rp 14.145.184.101,00	Rp -	Rp 91.968.708.098,00	Rp 9.425.818.000,00	Rp -		96,33	47,98	-	-	Rp 43.088.664.269,67	Rp 50.697.263.049,00
Belanja Hibah	Rp 8.250.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	Rp -	Rp 8.250.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp -		100,00	100,00	-	-	Rp 3.750.000.000,00	Rp 4.625.000.000,00

Pada tabel diatas terlihat bahwa postur anggaran Dinas Kesehatan Papua Barat Pada Tahun 2025, salah satu komponen belanja yang mengalami peningkatan terbesar adalah komponen belanja pegawai. Sementara untuk Belanja barang dan jasa meningkat disebabkan oleh program Papua Barat sehat sebagai program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terpilih, yang berfokus pada aspek kuratif /pengobatan, sementara untuk program promotif-preventif belum tersedia secara maksimal. Belanja modal mengalami penurunan cukup signifikan, disamping kebutuhan pendanaan dalam penyelesaian Gedung/layanan kanker, jantung dan stroke di RSUD Provinsi Papua Barat.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat adalah masyarakat Provinsi Papua Barat dan 7 Dinas Kesehatan Kabupaten, Rumah Sakit/UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan unit layanan lain di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat, bahwa layanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat antara lain:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unit Pelaksana Teknis; dan
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.5 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

1. Fasilitas Kesehatan:

Puskesmas, Rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan mitra utama Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

2. Non Government Organization (NGO)

Global Fund (GF) dan UNICEF. Di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Global Fund berfokus pada pengendalian dan pemberantasan HIV, TB dan Malaria, sedangkan UNICEF membantu upaya eliminasi malaria, peningkatan imunisasi, dan program WASH (Air, Sanitasi, dan Higiene)

3. Organisasi Profesi Kesehatan:

Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Palang Merah Indonesia (PMI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan organisasi profesi lainnya berperan dalam menjaga



standar pelayanan dan pemberian pelayanan Kesehatan yang lebih optimal pada masyarakat

4. Instansi Pemerintah Lainnya antara lain :

- a. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), berkolaborasi dalam hal penyediaan layanan Jaminan Kesehatan nasional (JKN) kepada masyarakat Papua Barat
- b. Dinas Sosial, berkolaborasi dalam hal penanganan masalah Kesehatan terkait kemiskinan termasuk penentuan sasaran penerima iuran PBI-JK
- c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berkolaborasi dalam penyediaan data penduduk dan data penduduk khusus OAP, serta data-data terkait data kelahiran, kematian, dan data kependudukan lainnya
- d. Dinas Pendidikan, berkolaborasi dalam program kesehatan sekolah, pendidikan kesehatan reproduksi, dan upaya pencegahan penyakit menular di lingkungan sekolah
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berkolaborasi dalam program kesehatan di tingkat desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan sanitasi dan lingkungan sehat
- f. Dinas Lingkungan Hidup, berkolaborasi dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat, serta pengelolaan sampah dan limbah
- g. Dinas Pekerjaan Umum, terlibat dalam pembangunan infrastruktur kesehatan, sanitasi, dan penyediaan air bersih
- h. POLRI/TNI, bekerjasama dalam situasi tertentu, penanganan masalah kesehatan yang memerlukan bantuan keamanan, seperti kejadian luar biasa (KLB) atau bencana alam.

2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang urusan kesehatan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan adanya “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan. Adanya gap ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini



harus diidentifikasi sehingga dapat dicarikan solusinya dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025 - 2029 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau masalah tersebut dengan tepat. Berikut kami sajikan tabel 2.4 yang memuat potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan, isu KLHS yang relevan dengan urusan Kesehatan, isu - isu global, nasional dan regional yang akan menjadi penentuan isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Tabel 2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banyak wilayah di Papua Barat yang masih tergolong 3 T (Tertinggal, terdapat, terluar) seperti Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama, sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan belum optimal dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, obat-obatan, serta program-program kesehatan belum merata	Akses terhadap fasilitas kesehatan primer dan rujukan masih terbatas, sarana dan prasarana serta kualitas dan tata kelola pelayanan kesehatan belum memadai, masih tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular akibat belum memadainya pengetahuan dan perilaku masyarakat serta rendahnya jangkauan pelayanan kesehatan, masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan balita akibat akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang masih terbatas terutama di daerah yang sulit secara geografis	Masih rendahnya kualitas lingkungan berpengaruh terhadap timbulnya penyakit sehingga perhatian terhadap kondisi lingkungan dengan sanitasi yang memadai juga merupakan hal penting dalam menunjang kesehatan masyarakat agar terhindar dari penyakit. Akses terhadap air bersih yang belum optimal, dampak limbah medis pada lingkungan, PHBS terkait lingkungan hidup yang belum memadai merupakan isu-isu lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan stunting khususnya pada kelompok-kelompok rentan.	Ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan, obat-obatan, dan vaksin, terutama di negara-negara rentan/berkembang termasuk Indonesia; belum optimalnya pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan untuk program-program kesehatan dalam mengatasi disparitas kualitas pelayanan kesehatan termasuk sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya sistem kesehatan global, termasuk untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.	Disparitas sistem kesehatan/akses dan kualitas pelayanan kesehatan antar wilayah, status kesehatan masih rendah (kematian ibu dan anak masih tinggi), penyakit menular masih tinggi, sumber daya manusia kesehatan masih rendah dan belum merata, belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas obat-obatan dan alat kesehatan, termasuk penguatan produksi dalam negeri; masih rendahnya layanan kesehatan primer, termasuk ketersediaan fasilitas dan sumber daya di Puskesmas, Pustu, Posyandu, serta integrasi layanan kesehatan berbasis masyarakat.	Di Papua Barat, belum semua kecamatan memiliki Puskesmas dan belum tersedia Rumah Sakit kelas A dan B di wilayah Provinsi, dan masih ada Kabupaten yang belum memiliki RS Tipe D, API (Annual parasite incidence) masih diatas 1 per 1000 penduduk, baru 1 kabupaten (Pegunungan Arfak) yang eliminasi malaria, masih tingginya kasus TB dan HIV serta penyakit menular dan tidak menular lainnya termasuk NTD, AKI dan AKB masih tinggi	Belum Meratanya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata hingga ke daerah sulit. Ketersediaan tenaga dokter spesialis belum merata hingga ke tingkat kabupaten				Rasio Dokter Umum masih dibawah 1 per 1000 penduduk, Ketersediaan Dokter Spesialis 4 Dasar 3 Penunjang masih dibawah 50%, 9 jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas per Kabupaten masih dibawah 60%	Belum Meratanya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan
	Terbatasnya ketersediaan obat-obatan di layanan dasar dan rujukan				persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial masih dibawah target 100% yaitu sebesar 70,83%, Pedagang besar farmasi dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) masih terbatas	Belum optimalnya Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif belum optimal				persentase Kabupaten yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) masih belum optimal, Masih kurangnya keterlibatan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya kesehatan	Masih rendahnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat
	Penyelenggaraan Akreditasi pada Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Lain, serta Rumah Sakit Baik Milik Pemerintah Daerah maupun Swasta belum optimal				masih belum optimalnya akreditasi pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan, terutama status akreditasi paripurna Puskesmas yang masih rendah	Masih rendahnya Akreditasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Balita gizi buruk dan stunting di Papua Barat masih tinggi yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah terhadap pengelolaan gizi dan masih belum optimalnya akses terhadap pelayanan gizi masyarakat yang memadai	Masih tingginya prevalensi gizi buruk terutama stunting pada balita akibat rendahnya akses dan ketidakmampuan memperoleh pangan bergizi serta pengetahuan dan perilaku yang tidak menunjang upaya perbaikan gizi, sanitasi lingkungan yang rendah		Stunting merupakan masalah global yang serius, berdasarkan data WHO Tahun 2024, 23,2% anak dibawah usia 5 tahun mengalami stunting dan 12,2% wasting.	Masih tingginya angka stunting pada balita dan masih rendahnya layanan kesehatan primer dan masih rendahnya intervensi gizi yang terintegrasi	Prevalensi stunting di Papua Barat masih diatas angka nasional yaitu 24,6% (rata-rata nasional sebesar 19,8 di Tahun 2024)	Masih Tingginya Angka Prevalensi Stunting
Papua Barat memiliki otonomi khusus sehingga perhatian dan prioritas terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai menjadi prioritas Dinas Kesehatan	Belum optimalnya layanan kesehatan yang khusus memprioritaskan orang asli papua (OAP) sesuai dengan amanat UU otonomi khusus		Perlu nya perbaikan pengelolaan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan untuk memastikan seluruh orang termasuk kelompok rentan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Pemanfaatan dan keberpihakan dana otsus terhadap sasaran kelompok masyarakat OAP belum optimal	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi OAP di Papua Barat belum optimal termasuk yang terintegrasi dengan Program JKN	Belum merata dan memadainya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi OAP

Dengan teridentifikasinya potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah dan permasalahan perangkat daerah serta dikaitkan dengan isu-isu yang relevan dengan perangkat daerah sebagaimana dapat dilihat pada uraian dalam tabel 2.4, sehingga berdasarkan idetifikasi permasalahan dapat ditentukan isu-isu strategis pembangunan di



Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, isu – isu strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum Meratanya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
2. Belum Meratanya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan;
3. Belum optimalnya Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
4. Masih rendahnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat;
5. Masih rendahnya Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
6. Masih Tingginya Angka Prevalensi Stunting; dan
7. Belum merata dan memadainya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi OAP.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap penting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah khususnya di bidang kesehatan periode Tahun 2025-2029. Tujuan yang dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2025 – 2029. Dengan visi yaitu **“Papua Barat Aman, Sejahtera, Bermartabat dan Mandiri”**, dan Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial;
2. Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah yang inklusif;
3. Membangun pertanian yang mandiri, berdaulat dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang mudah diakses dan berkualitas;
5. Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah;
6. Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju good governance;
7. Optimalisasi otonomi khusus untuk mensejahterakan Orang Asli Papua di Papua Barat.

Sebagai implementasi Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tersebut diterjemahkan dalam tataran pelaksanaan di perangkat daerah Dinas Kesehatan Papua Barat 2025 – 2029 dalam rencana strategis Dinas Kesehatan



Provinsi Papua Barat. Sebagai perangkat daerah teknis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat juga merumuskan kebijakan yang mencerminkan pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dijabarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua Barat 2025 - 2029. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat 2025 – 2029 urusan kesehatan termaktub pada :

1. Misi ke-1 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial”, Tujuan ke-1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berketahanan Sosial” dan Sasaran ke-1 “Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan” dengan indikator kinerja sasaran RPJMD yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) dan Persentase kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
2. Misi ke-1 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial”, Tujuan ke-1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berketahanan Sosial” dan Sasaran ke-2 “Menurunnya Angka Prevalensi Stunting” dengan indikator kinerja sasaran RPJMD yaitu Prevalensi stunting.
3. Misi ke-7 “Optimalisasi Otonomi Khusus untuk Orang Asli Papua di Papua Barat”, Tujuan ke-7 “Mewujudkan SDM OAP yang unggul, berkarakter, dan sejahtera melalui pembangunan inklusif berbasis kearifan lokal dan data terpilah OAP” dan Sasaran ke-23 “Meningkatnya akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan OAP” dengan indikator kinerja sasaran RPJMD yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua.

Dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat di atas, maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Menurunkan Angka Prevalensi Stunting dan Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi OAP

Tujuan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis, yaitu :

- Sasaran 1 (S.1)** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah
- Sasaran 2 (S.2)** : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata
- Sasaran 3 (S.3)** : Menurunkan Angka Kesakitan Malaria
- Sasaran 4 (S.4)** : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata
- Sasaran 5 (S.5)** : Meningkatkan Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Sasaran 6 (S.6)** : Meningkatkan Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat
- Sasaran 7 (S.7)** : Meningkatkan Akreditasi pelayanan Kesehatan
- Sasaran 8 (S.8)** : Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin
- Sasaran 9 (S.9)** : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata bagi OAP

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
									2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)		(02)		(03)		(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
Misi ke-1 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial”																
Tujuan ke-1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berketahanan Sosial”																
S1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	T1	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		T1	Usia Harapan Hidup (UHH)	68.47	69.45	69.79	70.13	70.47	70.81	71.16			
						Persentase kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (%)	14.29	14.29	14.29	14.29	42.86	57.14	71.42			
				S.1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	S.1.1	Nilai LAKIP	B	B	B	B	B	B	B	
				S.1.2		Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata	S.1.2	Persentase Kecamatan Memiliki 1 Puskesmas	79.07	82.95	91.24	100	100	100	100	
				S.1.3		Menurunkan Angka Kesakitan Malaria	S.1.3	Persentase Kabupaten / Kota yang mencapai API < 1 per 1.000 Penduduk	14.28	14.28	28.57	28.57	57.14	71.43	85.71	
				S.1.4		Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	S.1.4	Rasio Tenaga Medis Tenaga Kesehatan terhadap Populasi (per 1.000 Penduduk)	10.82	10,92	11.02	11.36	11.9	12.44	12.5	
				S.1.5		Meningkatnya Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan	S.1.5	Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	71.42	71.42	71.42	71.42	85.71	100	100	
				S.1.6		Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	S.1.6	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	42.85	57.14	71.42	71.42	85.71	100	100	
				S.1.7		Meningkatnya Akreditasi pelayanan Kesehatan	S.1.7	Persentase Kab/Kota dengan RS Pemerintah Terakreditasi Paripurna	71.42	71.42	71.42	71.42	85.71	100	100	
S2	Menurunnya Angka Prevalensi Stunting	T2	Menurunkan Angka Prevalensi Stunting		T2	Prevalensi Stunting (%)	24.60	22.60	20.26	18.16	16.29	14.60	13.09			
				S.2.1		Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin	S.2.1	Persentase Balita Gizi Buruk	10	9	7.8	7.6	7.4	7.2	7	
Misi ke-7 “Optimalisasi Otonomi Khusus untuk Orang Asli Papua di Papua Barat”																
Tujuan ke-7 “Mewujudkan SDM OAP yang unggul, berkarakter, dan sejahtera melalui pembangunan inklusif berbasis kearifan lokal dan data terpilah OAP”																
S23	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi OAP	T3	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi OAP		T3	Usia Harapan Hidup Orang Asli Papua	0	60	65,55	66,11	66,68	67,25	67,82			
				S.3.1		Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata bagi OAP	S.3.1	Cakupan Kartu Papua Sehat OAP	N.A	50	60	70	80	90	100	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.2.1. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah atau Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Untuk menghadapi lingkungan yang dinamis dan mencapai tujuan serta sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, diperlukan langkah-langkah atau penahapan strategi yang fleksibel, responsif terhadap perubahan dan terencana dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah strategi yang dapat diambil oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tersaji pada gambar berikut :

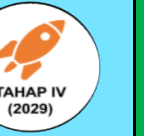
Gambar 3.1
Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2026- 2029



Penahapan strategi perangkat daerah dalam Renstra Kesehatan Provinsi Papua Barat 2025 – 2029 dimaksud adalah prioritas rencana strategis tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, penahapan Renstra dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2025 – 2029

 TAHAP I (2026)	 TAHAP II (2027)	 TAHAP III (2028)	 TAHAP IV (2029)	 TAHAP V (2030)
Pemenuhan kebutuhan, sarana prasarana, dan optimalisasi sasaran penerima layanan kesehatan khususnya oap dan kelompok rentan serta sinergi pembagian tugas/kewenangan antar Provinsi dengan Kabupaten, Fokus : Peningkatan sarana, prasarana, alat kesehatan, ketersediaan obat, tenaga medis	Perluasan akses layanan dan penjangkauan wilayah terpencil serta peningkatan program-program kesehatan termasuk penyakit menular dan tidak menular sesuai dengan kewenangan Provinsi dengan bersinergi dengan Kabupaten, fokus : Pemerataan akses, pengurangan kesenjangan layanan dan peningkatan program kesehatan	Penyediaan fasilitas pendidikan kesehatan yang mampu menyediakan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang cukup di wilayah Papua Barat. Fokus : optimalisasi tenaga kesehatan	Penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui pelatihan-pelatihan di bidang kesehatan, dan digitalisasi pelaporan satu data kesehatan dalam mendukung optimalisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Fokus : peningkatan kapasitas SDM kesehatan dan digitalisasi kesehatan	Penguatan sinergisme, evaluasi dan inovasi dalam memastikan pelayanan kesehatan berkualitas. Fokus : penguatan kelembagaan, sinergisme dan keberlanjutan hasil
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang memadai serta merata, keberlanjutan pembangunan gedung/layanan kanker, jantung dan stroke	Penyediaan sarana dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bergerak	Penyediaan fasilitas, sarana dan pra sarana penunjang fasilitas pendidikan kesehatan yang menunjang peningkatan kapasitas dan penyediaan tenaga kesehatan yang cukup	pelatihan-pelatihan di bidang kesehatan dan peningkatan kapasitas petugas/penanggung jawab program-program prioritas kesehatan	Penyediaan dan terlaksananya standar operasional prosedur pada setiap layanan kesehatan dan pada Dinas kesehatan Provinsi dan Kabupaten sebagai jaminan mutu pelayanan
Distribusi tenaga kesehatan yang merata dan cukup	Peningkatan kualitas program-program kesehatan, stunting, program penyakit menular termasuk HIV, TB, Malaria, NTD, penyakit tidak menular, integrasi layanan primer, pemeriksaan kesehatan gratis dan program prioritas lainnya	Penyediaan tenaga pengajar yang sesuai dengan disiplin ilmu kesehatan	pemanfaatan digitalisasi dalam rangka penguatan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan	peningkatan inovasi-inovasi solutif dalam mengatasi kerumitan birokrasi pelayanan kesehatan dan keberpihakan terhadap pelayanan kesehatan yang cepat, mudah dan berkualitas bagi masyarakat
penyediaan dan distribusi obat, alat kesehatan dan BMHP yang memadai	Pemerataan kecukupan obat, BMHP dan alat kesehatan di layanan dasar dan rujukan	penyediaan dokter spesialis, dokter, tenaga kesehatan dan jenis tenaga kesehatan lainnya sesuai standar yang dibutuhkan di layanan dasar dan rujukan	perluasan dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan dokter serta dokter spesialis afirmasi	Terselenggaranya evaluasi dan monitoring capaian kinerja program-program kesehatan prioritas dan dampak pelaksanaan program kesehatan yang terukur
Koordinasi dan konsolidasi pembagian tugas dan wewenang Provinsi dan Kabupaten dalam penyediaan layanan dan program kesehatan yang berkualitas	Koordinasi, advokasi, superisi dan bimbingan teknis serta penguatan sinergisme program-program kesehatan dengan Kabupaten	peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	pemanfaatan data dan informasi kesehatan dalam mendukung perencanaan, implementasi dan evaluasi kinerja program-program kesehatan	Penguatan peran provinsi sebagai pembina Kabupaten dan penguatan koordinasi, kolaborasi program-program kesehatan berdasarkan tugas/wewenang masing-masing
Penguatan perencanaan dan implementasi kelompok sasaran pelayanan kesehatan dan masalah kesehatan berbasis wilayah terutama pada OAP dan kelompok rentan	Peningkatan cakupan kepesertaan dan ketersediaan layanan kesehatan pada OAP dan kelompok rentan	pemberdayaan masyarakat lewat komunikasi, informasi, edukasi dan promosi kesehatan dalam menunjang pengetahuan tentang kesehatan, gizi, sanitasi, penyakit menular, tidak menular dan program prioritas lainnya	Keterbukaan informasi publik dalam penyebaran data dan informasi kesehatan	adokasi kebijakan kesehatan berbasis evidence-based data guna optimalisasi perencanaan dan penganggaran periode berikutnya

3.2.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Arah kebijakan akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran di rencana kerja perangkat daerah (RENJA) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat disesuaikan dengan isu strategis perangkat daerah. Rumusan arah kebijakan perangkat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025 – 2029 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Dinas Kesehatan 2025-2029

OPERASIONALISASI NSPK		ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD		Ket
1		2		4		5
1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1.1	Peningkatan tata kelola serta pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan	1.1.1	Penyediaan moda transportasi sesuai kondisi geografis wilayah (dataran, pegunungan, rawa, pesisir, dan kepulauan) pada daerah yang sulit akses dan tidak memiliki fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, termasuk penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan pada daerah sulit akses (3 T)	
				1.1.2	Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	
				1.1.3	Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	
				1.1.4	Perluasan Cakupan dan Pengembangan Layanan Telemedicine dan Pembangunan Puskesmas di Distrik Tanpa Puskesmas	
				1.1.5	Percepatan Akreditasi dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				1.1.6	Pengembangan Layanan Unggulan di RS Berdasarkan Kondisi Epidemiologis dan Kebutuhan Masyarakat Setempat	

OPERASIONALISASI NSPK		ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD		Ket
1		2		4		5
				1.1.7	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan RS Rujukan dan Layanan Kesehatan Pada Penduduk Berdampak Bencana	
				1.1.8	Perluasan Layanan dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang Bersenegri Dengan Program Lain Yang Melengkapi Paket Manfaat JKN	
				1.1.9	Peningkatan kualitas dan sanitasi kesehatan lingkungan, fasilitas penyedia makanan dan minuman, dan pengelolaan limbah medis sesuai standar	
		1.2	Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, dan peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses.	1.2.1	Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Melalui Afirmasi Pendayagunaan Lulusan Tenaga Kesehatan Terutama Untuk OAP Dalam Bentuk Ikatan Dinas, Penugasan Khusus dan Program Lainnya	
				1.2.2	Perluasan Cakupan Beasiswa Untuk Pendidikan Tenaga Kesehatan Bagi OAP Disertai Dengan Penempatan Wajib Pasca Kelulusan	
				1.2.3	Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan	
				1.2.4	Pengembangan Skema Insentif khusus Dan Penghargaan Bagi Tenaga medis dan tenaga Kesehatan Yang Berbasis Beban Kerja Dan Kondisi Geografis Lokasi Penugasan	
				1.2.5	Penyediaan fasilitas pendidikan kesehatan bagi penyediaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi tenaga medis tenaga kesehatan	
		1.3	Meningkatkan Cakupan Pengendalian Penyakit Menular dan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	1.3.1	Penguatan pendampingan dan koordinasi serta advokasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	
				1.3.2	Peningkatan Penemuan Kasus Melalui Deteksi Dini Dan Penemuan Kasus Penyakit Menular Secara Aktif Maupun Pasif	
				1.3.3	Peningkatan Penangan Kasus dan terapi Segera Dan Tepat Serta Pemantauan Pengobatan	
				1.3.4	Penguatan Sistim Surveilans Terpadu Berbasis Laboratorium	

OPERASIONALISASI NSPK		ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD		Ket
1		2		4		5
		1.4	Peningkatan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	1.4.1	Percepatan Akreditasi dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				1.4.2	Peningkatan status akreditasi menjadi Paripurna pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	
		1.5	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif	1.5.1	Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Berwawasan Kesehatan	
				1.5.2	Penguatan Regulasi Gerakan Masyarakat Untuk Membudayakan Hidup Sehat (Germas) Dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat Serta Keterjangkauan Pilihan Pangan Sehat	
				1.5.3	Peningkatan Kemandirian Dan Kapasitas Masyarakat Dalam Menyelenggarakan UKBM Terutama Posyandu Dan Posbindu PTM	
				1.5.4	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
		1.6	Peningkatan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan dan Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan	1.6.1	Perbaikan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Dan Vaksin Untuk Mencakupi Kebutuhan Seluruh Fasilitas Kesehatan termasuk obat tradisional	
				1.6.2	Peningkatan Kualitas Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Di Tingkat Provinsi	
2	Penurunan Angka Prevalensi Stunting	2.1	Peningkatan gizi, melalui pelaksanaan deteksi dini masalah gizi dan pemberian tata laksanaanya; Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung; Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman dan, Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan	2.1.1	Penguatan Surveilans Gizi Di Tingkat Kabupaten/Kota	
				2.1.2	Penguatan Pendidikan Gizi Melalui Diversifikasi Pangan Lokal Untuk Memenuhi Kebutuhan Gizi Keluarga	
				2.1.3	Peningkatan Cakupan Dan Kualitas Pembinaan Keluarga Sejahtera Dalam Pengasuhan 1000 HPK	
				2.1.4	Peningkatan sanitasi lingkungan khususnya dalam mendukung penurunan prevalensi stunting	
				2.1.5	Penguatan layanan dasar Puskesmas, Pustu dan Posyandu bagi Ibu dan Anak dalam mendukung penurunan prevalensi stunting	



OPERASIONALISASI NSPK		ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD		Ket
1		2		4		5
3	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi OAP	3.1	Peningkatan tata kelola serta pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan bagi OAP dan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan/ pengobatan gratis dan percepatan perbaikan gizi masyarakat, serta percepatan penurunan stunting bagi OAP	3.1.1	Penyediaan moda transportasi sesuai kondisi geografis wilayah (dataran, pegunungan, rawa, pesisir, dan kepulauan) pada daerah yang sulit akses dan tidak memiliki fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, termasuk penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan pada daerah sulit akses (3 T) dengan sasaran prioritas bagi OAP	
				3.1.2	Pemberian layanan dan pengobatan gratis bagi masyarakat OAP khususnya masyarakat tidak mampu lewat skema Papua Barat Sehat	
				3.1.3	Perluasan Layanan dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang bersinegri dengan Program Papua Barat Sehat	
				3.1.4	Pemberian intervensi spesifik dan sensitif bagi Ibu dan Anak OAP dalam mendukung penurunan prevalensi stunting	
				3.1.5	Penguatan Pendidikan Gizi Melalui Diversifikasi Pangan Lokal bagi masyarakat OAP	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dimulai dari Tahun 2025 hingga 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat daerah Tahun 2030. Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, memiliki kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD.
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - d) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
 - e) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah

- 
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c) Pengadaan Mebel

- 
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, memiliki kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - b) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
 - d) Pengembangan Rumah Sakit
 - e) Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)
 - f) Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
 - g) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

- 
- h) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
 - i) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 - j) Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
 - k) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - l) Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
 - m) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Minuman serta Fasilitas Kesehatan LainnyaPengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - n) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
 - e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
 - f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - i) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

- 
- k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
 - m) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
 - n) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - o) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - p) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
 - q) Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
 - r) Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
 - s) Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
 - t) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - u) Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
 - v) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
 - w) Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
 - x) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, dengan memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- 4) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS
 - b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB
 - c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria

- 
- d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
 - e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
 - f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
 - g) Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
 - h) Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
- 5) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - b) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
 - c) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dimana memiliki kegiatan sebagai berikut :
- 1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - b) Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - b) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 3) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN

- 
- 4) Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil
 - 5) Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 6) Pendayagunaan tenaga Kesehatan, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat
 - 7) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta OAP, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP
 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dimana memiliki kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK), memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
 - 2) Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), memiliki sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional



5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dimana memiliki kegiatan sebagai berikut :

1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

a) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

2) Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

a) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

b) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

a) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM

4) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

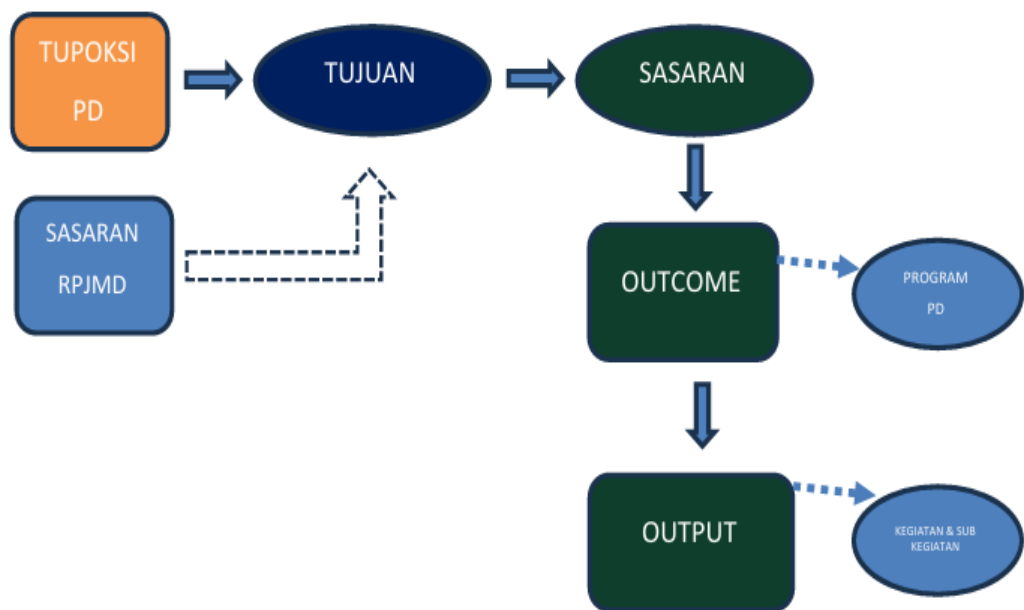
a) Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan

6. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan, dimana memiliki kegiatan sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Akreditasi pada Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Lain, serta Rumah Sakit Baik Milik Pemerintah Daerah maupun Swasta, memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)
- c) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat



Tabel 4.1
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan

NSPK DAN SASARAN (1)		TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)		OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN (7)		KET. (8)
SI	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	T1	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan				T1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
							S1.1	Nilai LAKIP		
				S1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah					
						OC1.1.1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	PROG. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
						OT1.1.1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEG. 1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SUBKEG. 1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
							Tersusunnya Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SUBKEG. 1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
							Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SUBKEG. 1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
							Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	SUBKEG. 1.1.4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
							Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	SUBKEG. 1.1.5	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
						OT1.1.1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEG. 1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
							Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	SUBKEG. 1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
							Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SUBKEG. 1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
							Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SUBKEG. 1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						OT1.1.1.3	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KEG. 1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
							Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	SUBKEG. 1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
							Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SUBKEG. 1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						OT1.1.1.4	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KEG. 1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
							Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SUBKEG. 1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
							Terdatanya dan Terkelolanya Administrasi Kepegawaian	SUBKEG. 1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
							Tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan	SUBKEG. 1.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
							Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	SUBKEG. 1.4.4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						OT1.1.1.5	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEG. 1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
							Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SUBKEG. 1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
							Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SUBKEG. 1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	SUBKEG. 1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	SUBKEG. 1.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	SUBKEG. 1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	SUBKEG. 1.5.6 Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUBKEG. 1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				OT1.1.1.6 Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OT1.1.1.6 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KEG. 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	SUBKEG. 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	SUBKEG. 1.6.2 Pengadaan Mebel	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SUBKEG. 1.6.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				OT1.1.1.7 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OT1.1.1.7 Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEG. 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SUBKEG. 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SUBKEG. 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianyav Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SUBKEG. 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				OT1.1.1.8 Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OT1.1.1.8 Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEG. 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	SUBKEG. 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SUBKEG. 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	SUBKEG. 1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SUBKEG. 1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		S1.2 Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata			S1.2 Usia Harapan Hidup (UHH)		
			OC1.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		OC1.2.1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	PROG. 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					OC1.2.2 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		
					OC1.2.3 Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi		
					OC1.2.4 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		
					OC1.2.5 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi		
					OC1.2.6 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		
					OC1.2.7 Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia		
					OC1.2.8 Cakupan Kepesertaan JKN		
					OC1.2.9 Persentase Kabupaten/Kota mencapai target STBM		
					OC1.2.10 Prevalensi HIV		
					OC1.2.11 Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)		
					OC1.2.12 Angka keberhasilan Pengobatan kasus TBC (success rate)		
					OC1.2.13 Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		
					OC1.2.14 Persentase hipertensi dalam pengendalian		
					OC1.2.15 Persentase jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer		
					OC1.2.16 Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN		
					OC1.2.17 Persentase Penduduk penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis		

NSPK DAN SASARAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
				OT1.2.1.1 Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	OT1.2.1.1 Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	KEG. 2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	SUBKEG. 2.1.1 Pembangunan Rumah Sakit Berserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
				Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	SUBKEG. 2.1.2 Pembangunan Rumah Sakit Berserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
				Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	SUBKEG. 2.1.3 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	SUBKEG. 2.1.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
				Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	SUBKEG. 2.1.5 Pengembangan Rumah Sakit	
				Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	SUBKEG. 2.1.6 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	
				Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	SUBKEG. 2.1.7 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	SUBKEG. 2.1.8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	SUBKEG. 2.1.9 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
				Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	SUBKEG. 2.1.10 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
				Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	SUBKEG. 2.1.11 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
				Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	SUBKEG. 2.1.12 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Terbangunnya Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun	SUBKEG. 2.1.13 Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	
				Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	SUBKEG. 2.1.14 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	SUBKEG. 2.1.15 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				OT1.2.1.2 Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	OT1.2.1.2 Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	KEG. 2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	SUBKEG. 2.2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	SUBKEG. 2.2.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	SUBKEG. 2.2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	SUBKEG. 2.2.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	SUBKEG. 2.2.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	

NSPK DAN SASARAN (1)		TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)		OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	SUBKEG. 2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	SUBKEG. 2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	SUBKEG. 2.2.8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
						Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	SUBKEG. 2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	SUBKEG. 2.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	SUBKEG. 2.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	SUBKEG. 2.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
						Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	SUBKEG. 2.2.13	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
						Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	SUBKEG. 2.2.14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
						Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	SUBKEG. 2.2.15	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
						Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	SUBKEG. 2.2.16	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
						Terverifikasi dan Terlaksananya Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	SUBKEG. 2.2.17	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
						Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	SUBKEG. 2.2.18	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
						Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	SUBKEG. 2.2.19	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
						Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	SUBKEG. 2.2.20	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
						Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	SUBKEG. 2.2.21	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
						Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	SUBKEG. 2.2.22	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
						Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	SUBKEG. 2.2.23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
						OT1.2.1.3 Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	OT1.2.1.3 Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	KEG. 2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
						Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	SUBKEG. 2.3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
						OT1.2.1.4 Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	OT1.2.1.4 Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	KEG. 2.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
						Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	SUBKEG. 2.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
						Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	SUBKEG. 2.4.2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
						Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	SUBKEG. 2.4.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
						OT1.2.1.5 Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	OT1.2.1.5 Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	KEG. 2.5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	SUBKEG. 2.5.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS

NSPK DAN SASARAN (1)		TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)		OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN (7)		KET. (8)
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	SUBKEG. 2.5.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	SUBKEG. 2.5.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	SUBKEG. 2.5.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	SUBKEG. 2.5.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	
						Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	SUBKEG. 2.5.6	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	
						Terlaksananya Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	SUBKEG. 2.5.7	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	
			S1.3	Menurunkan Angka Kesakitan Malaria			S1.3	Persentase kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (%)		
					OC1.3.1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat dalam penanganan Malaria	OC1.3.1	Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	PROG. 3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
						OT1.3.1.1	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	OT1.3.1.1	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	SUBKEG. 3.1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	
			S1.4	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata			S1.4	Rasio Tenaga Medis Tenaga Kesehatan terhadap Populasi (per 1.000 Penduduk)		
					OC1.4.1	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	OC1.4.1	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	PROG. 4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
							OC1.4.2	Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya		
							OC1.4.3	Persentase Status Aktif Kepesertaan JKN-OAP		
						OT1.4.3.1	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	OT1.4.3.1	Persentase Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	
						Terpenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	SUBKEG. 3.1.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
						Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	SUBKEG. 3.1.2	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
						OT1.4.3.2	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	OT1.4.3.2	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	
						Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	SUBKEG. 4.2.1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	SUBKEG. 4.2.2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
						OT1.4.3.3	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua	OT1.4.3.3	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua	
						Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	SUBKEG. 4.3.1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	
						OT1.4.3.4	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	OT1.4.3.4	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	
						Terlaksananya Jaminan Kesehatan kepada OAP yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	SUBKEG. 4.4.1	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	

NSPK DAN SASARAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
				OT1.4.3.5 Terlaksananya Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil	OT1.4.3.5 Persentase Terlaksananya Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil	KEG. 4.5 Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil	
				Terlaksananya tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	SUBKEG. 4.5.1 Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	
				OT1.4.3.6 Terlaksananya Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik	OT1.4.3.6 Persentase Terlaksananya Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik	KEG. 4.6 Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik	
				Terlaksananya jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	SUBKEG. 4.6.1 Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	
				OT1.4.3.7 Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	OT1.4.3.7 Persentase Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	KEG. 4.7 Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	
				Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	SUBKEG. 4.7.1 Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	
				OT1.4.3.8 Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta OAP	OT1.4.3.8 Persentase Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta OAP	KEG. 4.8 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta OAP	
				Terlaksananya Pemberian stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP	Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan	SUBKEG. 4.8.1 Pemberian stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP	
		S1.5 Meningkatnya Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan			S1.5 Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar		
			OC1.5.1 Meningkatnya kualitas mutu dan layanan Pedagang Besar Farmasi (PNF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		OC1.5.1 Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	PROG. 5 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					OC1.5.2 Persentase Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha		
				OT1.5.1.1 Terlaksananya Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	OT1.5.1.1 Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	KEG. 5.1 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	SUBKEG. 5.1.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	
				OT1.5.1.2 Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	OT1.5.1.2 Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	KEG. 5.2 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	SUBKEG. 5.2.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	
		S1.6 Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat			S1.6 Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		
			OC1.6.1 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		OC1.6.1 Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	PROG. 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				OT1.6.1.1 Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	OT1.6.1.1 Persentase Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	KEG. 6.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	SUBKEG. 6.1.1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
				OT1.6.1.2 Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	OT1.6.1.2 Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	KEG. 6.2 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	
				Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	SUBKEG. 6.2.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	SUBKEG. 6.2.2 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
				OT1.6.1.3 Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	OT1.6.1.3 Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	KEG. 6.3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	SUBKEG. 6.3.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	
				OT1.6.1.4 Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	OT1.6.1.4 Persentase Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	KEG. 6.4 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
				Tersusunnya Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	SUBKEG. 6.4.1 Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	
		S1.7	Meningkatnya Akreditasi pelayanan Kesehatan		S1.7 Persentase Kab/Kota dengan RS Pemerintah Terakreditasi Paripurna		
			OC1.7.1	Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	OC1.7.1 Proporsi fasyankes terakreditasi paripurna	PROG. 7 PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	
				OT1.7.1.1 Terlaksananya Akreditasi pada Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Lain, serta Rumah Sakit Baik Milik Pemerintah Daerah maupun Swasta	OT1.7.1.1 Persentase terlaksananya Akreditasi pada Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Lain, serta Rumah Sakit Baik Milik Pemerintah Daerah maupun Swasta	KEG. 7.1 Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	
				Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	SUBKEG. 7.1.1 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	SUBKEG. 7.1.2 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)	
				Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Budaya Zero Harm	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	SUBKEG. 7.1.3 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)	
	T2	Menurunkan Angka Prevalensi Stunting			T2 Prevalensi Stunting (%)		
		S2.1	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin		S2.1 Persentase Balita Gizi Buruk		
			OC2.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat dalam penanganan Stunting	OC2.1.1 Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (Terkait Penurunan Prevalensi Stunting)	PROG. 8 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				OT2.1.1.1 Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	OT2.1.1.1 Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	KEG. 8.1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	SUBKEG. 8.1.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
57 Mewujudkan SDM OAP yang unggul, berkarakter, dan sejahtera melalui pembangunan inklusif berbasis kearifan lokal dan data terpadu OAP	T3 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi OAP				T3 Usia Harapan Hidup Orang Asli Papua		
		S3.1 Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata bagi OAP			S3.1 Cakupan Kartu Papua Sehat OAP		
			OC3.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Orang Asli Papua		OC3.1.1 Jumlah Penduduk OAP yang menerima Pelayanan Program Papua Sehat	PROG. 9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				OT3.1.1.1 Terlaksananya Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	OT3.1.1.1 Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	KEG. 9.1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN
				Terlaksana Jaminan Kesehatan kepada OAP yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	SUBKEG. 9.1.1	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																KET.						
				2025				2026				2027				2028					2029				2030	
		TARGET		PAGU		TARGET		PAGU		TARGET		PAGU		TARGET		PAGU		TARGET			PAGU		TARGET		PAGU	
		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	Kategori	B	Kategori	70.379.335.660,89	B	Kategori	73.899.421.051,46	B	Kategori	77.594.392.104,03	B	Kategori	81.474.111.709,23	B	Kategori	85.547.817.294,70	B	Kategori	89.825.208.159,43					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	100	%	133.934.659,50	100	%	386.750.000,00	100	%	774.478.552,57	100	%	813.202.480,20	100	%	981.525.000,00	100	%	1.030.601.250,00					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Dokumen	1	Dokumen	98.934.659,50	1	Dokumen	105.000.000,00	1	Dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	210.000.000,00	1	Dokumen	250.000.000,00	1	Dokumen	262.500.000,00					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	35.000.000,00	1	Dokumen	36.750.000,00	1	Dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	210.000.000,00	1	Dokumen	250.000.000,00	1	Dokumen	262.500.000,00					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	-	1	Laporan	45.000.000,00	1	Laporan	164.478.552,57	1	Laporan	172.702.480,20	1	Laporan	250.000.000,00	1	Laporan	262.500.000,00					
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor	Jumlah Data Statistik Sektor	0	Data	45	Data	-	50	Data	100.000.000,00	55	Data	105.000.000,00	60	Data	110.250.000,00	65	Data	115.762.500,00	70	Data	121.550.625,00					
Penyelenggaraan Walidita Pendukung Statistik Sektor	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalamRangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	-	1	Dokumen	100.000.000,00	1	Dokumen	105.000.000,00	1	Dokumen	110.250.000,00	1	Dokumen	115.762.500,00	1	Dokumen	121.550.625,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	100	%	66.034.667.000,20	100	%	67.595.607.500,46	100	%	69.543.107.500,46	100	%	71.530.482.500,47	100	%	73.517.226.250,46	100	%	75.472.332.187,96					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360	Orang/ Bulan	360	Orang/ Bulan	65.999.667.000,00	365	Orang/ Bulan	67.358.857.500,25	370	Orang/ Bulan	69.123.107.500,46	375	Orang/ Bulan	71.068.482.500,47	380	Orang/ Bulan	73.017.226.250,46	385	Orang/ Bulan	74.934.832.187,96					
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	1	Dokumen	-	1	Dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	220.000.000,00	1	Dokumen	242.000.000,00	1	Dokumen	250.000.000,00	1	Dokumen	275.000.000,00					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	35.000.000,20	1	Laporan	36.750.000,21	1	Laporan	200.000.000,00	1	Laporan	220.000.000,00	1	Laporan	250.000.000,00	1	Laporan	262.500.000,00					
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	100	%	-	100	%	200.000.000,00	100	%	210.000.000,00	100	%	300.000.000,00	100	%	315.000.000,00	100	%	330.750.000,00					
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	-	1	Dokumen	100.000.000,00	1	Dokumen	105.000.000,00	1	Dokumen	150.000.000,00	1	Dokumen	157.500.000,00	1	Dokumen	165.375.000,00					
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	0	Laporan	-	1	Laporan	100.000.000,00	1	Laporan	105.000.000,00	1	Laporan	150.000.000,00	1	Laporan	157.500.000,00	1	Laporan	165.375.000,00					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	100	%	200.000.000,00	100	%	415.000.000,00	100	%	550.000.000,00	100	%	665.000.000,00	100	%	698.250.000,00	100	%	890.762.500,00					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	Paket	0	Paket	-	1	Paket	65.000.000,00	1	Paket	100.000.000,00	1	Paket	105.000.000,00	1	Paket	110.250.000,00	1	Paket	115.762.500,00					
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	0	Dokumen	-	1	Dokumen	100.000.000,00	1	Dokumen	100.000.000,00	1	Dokumen	150.000.000,00	1	Dokumen	157.500.000,00	1	Dokumen	250.000.000,00					
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	0	Orang	-	100	Orang	100.000.000,00	102	Orang	150.000.000,00	104,04	Orang	200.000.000,00	106,1208	Orang	210.000.000,00	108	Orang	262.500.000,00					

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																KET.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030								
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU							
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)						
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1	Dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	150.000.000,00	1	Dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	210.000.000,00	1	Dokumen	220.500.000,00	1	Dokumen	262.500.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	%	854.855.450,19	100	%	1.386.500.000,00	100	%	2.175.000.000,00	100	%	2.868.750.000,00	100	%	2.966.628.656,79	100	%	3.412.651.142,20	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	20.000.000,00	1	Paket	21.000.000,00	1	Paket	75.000.000,00	1	Paket	78.750.000,00	1	Paket	82.687.500,00	1	Paket	100.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	1	Paket	-	1	Paket	100.000.000,00	1	Paket	250.000.000,00	1	Paket	262.500.000,00	1	Paket	275.625.000,00	1	Paket	401.212.927,57	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	72.038.450,19	1	Paket	78.750.000,00	1	Paket	150.000.000,00	1	Paket	157.500.000,00	1	Paket	165.375.000,00	1	Paket	200.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	161.982.000,00	1	Paket	105.000.000,00	1	Paket	150.000.000,00	1	Paket	200.000.000,00	1	Paket	210.000.000,00	1	Paket	250.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Dokumen	0	Dokumen	54.000.000,00	1	Dokumen	100.000.000,00	1	Dokumen	150.000.000,00	1	Dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	210.000.000,00	1	Dokumen	220.500.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	1	Laporan	135.000.000,00	1	Laporan	141.750.000,00	1	Laporan	200.000.000,00	1	Laporan	210.000.000,00	1	Laporan	220.500.000,00	1	Laporan	275.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	Laporan	411.835.000,00	1	Laporan	840.000.000,00	1	Laporan	1.200.000.000,00	1	Laporan	1.760.000.000,00	1	Laporan	1.802.441.156,79	1	Laporan	1.965.938.214,63	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	Persen	100	%	760.000.000,00	100	%	1.010.000.000,00	100	%	1.022.500.000,00	100	%	1.425.375.000,00	100	%	1.958.643.750,00	100	%	2.978.575.937,50	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	1	Unit	760.000.000,00	1	Unit	760.000.000,00	1	Unit	760.000.000,00	1	Unit	760.000.000,00	1	Unit	760.000.000,00	2	Unit	1.520.000.000,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Paket	0	Paket	-	1	Paket	100.000.000,00	1	Paket	105.000.000,00	1	Paket	500.000.000,00	1	Paket	1.025.000.000,00	1	Paket	1.076.250.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	-	1	Unit	150.000.000,00	1	Unit	157.500.000,00	1	Unit	165.375.000,00	1	Unit	173.643.750,00	1	Unit	382.325.937,50	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	100	%	2.287.713.551,00	100	%	2.355.563.551,00	100	%	2.541.806.051,00	100	%	2.796.273.176,00	100	%	3.399.551.157,25	100	%	3.495.493.037,56	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Laporan	0	Laporan	-	1	Laporan	35.000.000,00	1	Laporan	36.750.000,00	1	Laporan	50.000.000,00	1	Laporan	100.000.000,00	1	Laporan	105.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	657.000.000,00	1	Laporan	689.850.000,00	1	Laporan	824.342.500,00	1	Laporan	1.065.559.625,00	1	Laporan	1.418.837.606,25	1	Laporan	1.689.779.486,56	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	1.630.713.551,00	1	Laporan	1.630.713.551,00	1	Laporan	1.680.713.551,00	1	Laporan	1.680.713.551,00	1	Laporan	1.880.713.551,00	1	Laporan	1.700.713.551,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	100	%	108.165.000,00	100	%	550.000.000,00	100	%	777.500.000,00	100	%	1.075.028.552,57	100	%	1.710.992.480,20	100	%	2.214.042.104,21	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21	Unit	0	Unit	-	21	Unit	100.000.000,00	21	Unit	205.000.000,00	21	Unit	215.250.000,00	21	Unit	250.000.000,00	21	Unit	350.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	59	Unit	0	Unit	78.165.000,00	59	Unit	100.000.000,00	59	Unit	205.000.000,00	59	Unit	215.250.000,00	59	Unit	250.000.000,00	59	Unit	300.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	191	Unit	0	Unit	30.000.000,00	100	Unit	100.000.000,00	105	Unit	105.000.000,00	110	Unit	110.250.000,00	115	Unit	150.000.000,00	120	Unit	250.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	0	Unit	-	1	Unit	250.000.000,00	1	Unit	262.500.000,00	1	Unit	534.278.552,57	1	Unit	1.060.992.480,20	1	Unit	1.314.042.104,21	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																KET.						
				2025				2026				2027				2028					2029				2030	
				TARGET		PAGU		TARGET		PAGU		TARGET		PAGU		TARGET		PAGU			TARGET		PAGU			
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)										
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Usia Harapan Hidup	68,47		69,45	Tahun	49.882.612.638,04	69,79	Tahun	56.544.612.284,41	70,13	Tahun	67.288.088.618,46	70,47	Tahun	80.072.825.455,95	70,81	Tahun	84.076.466.728,75	71,16	Tahun	88.280.290.065,19					
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1.77 : 1000	Rasio TT : 1000 Penduduk	1.8 : 1000	Rasio TT : 1000 Penduduk	20.351.718.780,65	1.9 : 1000	Rasio TT : 1000 Penduduk	20.993.274.122,96	2.0 : 1000	Rasio TT : 1000 Penduduk	29.297.295.926,91	2.1 : 1000	Rasio TT : 1000 Penduduk	39.022.152.058,16	2.2 : 1000	Rasio TT : 1000 Penduduk	40.854.783.268,27	2.3 : 1000	Rasio TT : 1000 Penduduk	42.897.522.431,68					
	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	176	Angka Kematian	158	Per 100.000	516.166.000,00	145	Per 100.000	1.184.094.399,50	133	Per 100.000	1.272.299.120,00	122	Per 100.000	1.335.914.076,21	112	Per 100.000	1.402.709.780,03	102	Per 100.000	1.472.845.269,03					
	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	100	%	100	%	8.157.332.339,40	100	%	9.615.133.400,00	100	%	10.595.890.070,00	100	%	11.603.434.573,50	100	%	12.183.606.302,18	100	%	12.792.786.617,28					
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	%	100	%	3.960.160.632,00	100	%	3.713.377.206,30	100	%	4.039.912.039,62	100	%	4.386.904.929,30	100	%	4.751.108.708,56	100	%	4.988.664.143,99					
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100	%	100	%	2.999.183.181,00	100	%	3.704.939.090,05	100	%	3.862.092.032,05	100	%	4.026.040.417,41	100	%	4.200.960.298,28	100	%	4.411.008.313,19					
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	38,84	Angka Kematian	36,74	Per 1000 kelahiran	516.166.000,00	34,64	Per 1000 kelahiran	934.094.400,00	32,54	Per 1000 kelahiran	1.009.799.120,00	30,44	Per 1000 kelahiran	1.060.289.076,00	28,34	Per 1000 kelahiran	1.113.303.529,80	26,24	Per 1000 kelahiran	1.168.968.706,29					
	Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	100	%	100	%	75.328.000,00	100	%	150.000.000,00	100	%	177.615.661,00	100	%	186.496.444,05	100	%	195.821.266,25	100	%	205.612.329,57					
	Cakupan Kepesertaan JKN	96,3	%	98,6	%	8.757.540.000,38	98,7	%	9.345.417.000,40	98,8	%	9.812.687.850,42	98,9	%	10.303.322.242,94	99	%	10.818.488.355,09	99,1	%	11.359.412.772,84					
	Persentase Kabupaten/kota mencapai target STBM	0	%	14,29	%	941.404.407,21	28,58	%	822.393.050,00	42,86	%	863.512.702,50	57,14	%	906.688.337,63	71,43	%	952.022.754,51	85,71	%	999.623.892,23					
	Positive Rate HIV	2,3	%	2,21	%	726.433.158,80	2,15	%	837.995.323,36	2,09	%	879.895.089,53	2,03	%	923.889.844,00	1,96	%	970.084.336,20	1,5	%	1.018.588.553,01					
	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	88	%	95	%	792.423.576,20	95	%	1.287.995.323,36	95	%	1.352.395.089,53	95	%	1.420.014.844,00	95	%	1.491.015.586,20	95	%	1.565.566.365,51					
	Angka keberhasilan Pengobatan kasus TBC (success rate)	72	%	85	%	25.168.000,00	85	%	851.426.400,00	85	%	893.997.720,00	85	%	938.697.606,00	85	%	985.632.486,30	85	%	1.034.914.110,62					
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	89	%	90	%		91	%	862.995.323,36	92	%	906.145.089,53	93	%	951.452.344,00	95	%	999.024.961,20	95	%	1.048.976.209,26					
	Persentase hipertensi dalam pengendalian	24	%	25	%	447.179.011,60	30	%	550.000.000,00	35	%	577.500.000,00	40	%	606.375.000,00	45	%	636.693.750,00	50	%	668.528.437,50					
	Persentase jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer	N.A	%	10	%		20	%	6.187.116.595,20	40	%	6.545.588.085,96	60	%	8.573.117.490,26	80	%	9.001.773.364,77	100	%	9.451.862.033,01					
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	10,33	%	14,46	%	156.734.903,00	20,25	%	225.000.000,00	28,35	%	236.250.000,00	39,68	%	248.062.500,00	55,56	%	260.465.625,00	60,55	%	273.488.906,25					
	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	N.A	%	20	%	N.A	30	%	1.649.090.502,80	40	%	1.780.660.688,94	60	%	1.869.693.723,39	80	%	1.963.178.409,56	80	%	2.061.337.330,03					
	Prevalensi obesitas > 18 Tahun	22,195	%	22,1	%		22,1	%		22,1	%		22,1	%		22,1	%		22,1	%						
	Persentase merokok penduduk 10-21 Tahun	7,6	%	7,6	%		7,6	%		7,6	%		7,6	%		7,6	%		7,6	%						
	Persentase Diabetes dalam pengendalian	6,2	%	10	%		12	%		14	%		16	%		25	%		25	%						
	Prevalensi Depresi pada usia > 15 Tahun	1	%	1	%		1	%		1	%		1	%		1	%		1	%						
	Jumlah Pelayanan Kesehatan bergerak yang dilaksanakan di kampung	4	Layanan	3	Layanan		4	Layanan		4	Layanan		8			8	Layanan		8	Layanan						
	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	0	Kab/Kota	1	Kab/Kota		1	Kab/Kota		2	Kab/Kota		2			3	Kab/Kota		4	Kab/Kota						
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	N.A	%	10	%		20	%		30	%		40	%		50	%		60	%						
	Persentase kab/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	30	%	40	%		50	%		60	%		70	%		80	%		90	%						

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																KET.							
				2025				2026				2027				2028					2029				2030		
				TARGET		PAGU		TARGET		PAGU		TARGET		PAGU		TARGET		PAGU			TARGET		PAGU				
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)											
(1)	(2)	(3)																									
	Kabupaten/Kota dengan eliminasi kusta	0	Kab/Kota	1	Kab/Kota			1	Kab/Kota			2	Kab/Kota			3			5	Kab/Kota			6	Kab/Kota			
	Persentase Kab/kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	30	%	40	%			50	%			60	%			70			80	%			90	%			
	Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	36.25	%	40	%			45	%			50	%			55			60	%			65	%			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	100	%	23,315,930,524.00		100	%	26,527,701,194.92		100	%	35,573,444,352.47		100	%	46,618,107,904.99		100	%	48,788,186,907.44		100	%	51,181,011,252.81	
Pembangunan Rumah Sakit Berserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0	Unit	0	Unit	-		1	Unit	5,470,083,913.16		1	Unit	8,645,767,157.72		1	Unit	12,147,428,952.59		1	Unit	12,674,387,203.72		1	Unit	13,284,814,063.91	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0	Unit	1	Unit	400,000,000.00		1	Unit	2,000,000,000.00		1	Unit	3,100,000,000.00		2	Unit	4,000,000,000.00		2	Unit	4,200,000,000.00		2	Unit	4,410,000,000.00	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	0	Unit	1	Unit	-		1	Unit	1,000,000,000.00		1	Unit	1,200,000,000.00		1	Unit	1,260,000,000.00		1	Unit	1,323,000,000.00		1	Unit	1,389,150,000.00	
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	Unit	1	Unit	10,444,708,084.40		1	Unit	5,470,083,913.15		1	Unit	8,645,767,157.71		1	Unit	12,147,428,952.40		1	Unit	12,674,387,203.72		1	Unit	13,284,814,063.90	
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	4	Layanan	3	Layanan	492,675,913.60		4	Layanan	1,300,000,000.00		4	Layanan	1,365,000,000.00		4	Layanan	2,000,000,000.00		8	Layanan	2,100,000,000.00		8	Layanan	2,205,000,000.00	
Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	0	Unit	0	Unit	-		1	Unit	800,000,000.00		1	Unit	840,000,000.00		1	Unit	882,000,000.00		1	Unit	926,100,000.00		1	Unit	972,405,000.00	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	Unit	1	Unit	2,202,100,000.00		1	Unit	700,000,000.00		1	Unit	1,000,000,000.00		1	Unit	1,500,000,000.00		1	Unit	1,575,000,000.00		1	Unit	1,653,750,000.00	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	3	Unit	1	Unit	5,471,187,507.00		1	Unit	2,037,533,368.61		1	Unit	2,081,910,037.04		1	Unit	5,000,000,000.00		1	Unit	5,250,000,000.00		1	Unit	5,512,500,000.00	
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	0	Unit	0	Unit	-		5	Unit	500,000,000.00		7	Unit	525,000,000.00		9	Unit	725,000,000.00		11	Unit	761,250,000.00		13	Unit	799,312,500.00	
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0	Unit	0	Unit	-		5	Unit	500,000,000.00		7	Unit	525,000,000.00		9	Unit	725,000,000.00		11	Unit	761,250,000.00		13	Unit	799,312,500.00	
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	0	Unit	2	Unit	292,082,846.00		2	Unit	400,000,000.00		2	Unit	420,000,000.00		2	Unit	450,000,000.00		2	Unit	472,500,000.00		2	Unit	496,125,000.00	
Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun	0	Unit	0	Unit	-		1	Unit	1,850,000,000.00		1	Unit	2,000,000,000.00		0	Unit	-		0	Unit	-		0	Unit	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																KET.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030							
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
(1)	(2)	(3)																			
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dokumen	1	Dokumen	1.693.176.173,00	1	Dokumen	2.000.000.000,00	1	Dokumen	2.100.000.000,00	1	Dokumen	2.300.000.000,00	1	Dokumen	2.415.000.000,00	1	Dokumen	2.535.750.000,00
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	Paket	1	Paket	2.320.000.000,00	1	Paket	2.500.000.000,00	1	Paket	3.125.000.000,00	1	Paket	3.481.250.000,00	1	Paket	3.655.312.500,00	1	Paket	3.838.078.125,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	100	%	24.188.192.857,24	100	%	25.466.911.089,50	100	%	26.902.144.266,00	100	%	28.363.092.550,96	100	%	29.899.723.571,32	100	%	31.394.709.749,88
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1000	Orang	1100	Orang	2.827.630.928,00	1210	Orang	2.817.319.460,00	1331	Orang	3.099.051.406,00	1464	Orang	3.399.001.264,00	1610	Orang	3.713.809.860,00	1756	Orang	3.899.500.353,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85718	Orang	1100	Orang	1.396.500.000,00	1210	Orang	2.022.121.750,00	1331	Orang	2.095.133.825,00	1464	Orang	2.170.734.300,00	1610	Orang	2.252.888.875,00	1756	Orang	2.365.533.318,75
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	Dokumen	1	Dokumen	440.838.000,00	1	Dokumen	750.000.000,00	1	Dokumen	787.500.000,00	1	Dokumen	826.875.000,00	1	Dokumen	868.218.750,00	1	Dokumen	911.629.687,50
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	Dokumen	1	Dokumen	75.328.000,00	1	Dokumen	184.094.400,00	1	Dokumen	222.299.120,00	1	Dokumen	233.414.076,00	1	Dokumen	245.084.779,80	1	Dokumen	257.339.018,79
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1	Dokumen	1	Dokumen	75.328.000,00	1	Dokumen	150.000.000,00	1	Dokumen	177.615.661,00	1	Dokumen	186.496.444,05	1	Dokumen	195.821.266,25	1	Dokumen	205.612.329,57
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	1	Dokumen	150.000.000,00	1	Dokumen	157.500.000,00	1	Dokumen	165.375.000,00	1	Dokumen	173.643.750,00	1	Dokumen	182.325.937,50	1	Dokumen	191.442.234,38
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	1	Dokumen	636.810.424,81	1	Dokumen	350.000.000,00	1	Dokumen	367.500.000,00	1	Dokumen	385.875.000,00	1	Dokumen	405.168.750,00	1	Dokumen	425.427.187,50
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	0	Dokumen	-	1	Dokumen	150.000.000,00	1	Dokumen	157.500.000,00	1	Dokumen	165.375.000,00	1	Dokumen	173.643.750,00	1	Dokumen	182.325.937,50
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	Dokumen	1	Dokumen	381.911.808,00	1	Dokumen	401.007.398,40	1	Dokumen	421.057.768,32	1	Dokumen	442.110.656,74	1	Dokumen	464.216.189,57	1	Dokumen	487.426.999,05
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Dokumen	1	Dokumen	2.235.895.058,00	1	Dokumen	2.189.976.616,80	1	Dokumen	2.299.475.447,64	1	Dokumen	2.414.449.220,02	1	Dokumen	2.535.171.681,02	1	Dokumen	2.661.930.265,07
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	0	Dokumen	1	Dokumen	125.840.000,00	1	Dokumen	132.132.000,00	1	Dokumen	138.738.600,00	1	Dokumen	145.675.530,00	1	Dokumen	152.959.306,50	1	Dokumen	160.607.271,83
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	Dokumen	1	Dokumen	154.593.982,40	1	Dokumen	164.893.050,00	1	Dokumen	173.137.702,50	1	Dokumen	181.794.587,63	1	Dokumen	190.884.317,01	1	Dokumen	200.428.532,86

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																KET.								
				2025				2026				2027				2028					2029				2030			
				TARGET		PAGU		TARGET		PAGU		TARGET		PAGU		TARGET		PAGU			TARGET		PAGU		TARGET		PAGU	
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)												
(1)	(2)	(3)																										
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	1	Dokumen	8.757.540.000,38	1	Dokumen	9.195.417.000,40	1	Dokumen	9.655.187.850,42	1	Dokumen	10.137.947.242,94	1	Dokumen	10.644.844.605,09	1	Dokumen	11.177.086.835,34							
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	1	Dokumen	870.217.375,00	1	Dokumen	913.728.243,75	1	Dokumen	959.414.655,94	1	Dokumen	1.007.385.388,73	1	Dokumen	1.057.754.658,17	1	Dokumen	1.110.642.391,08							
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	659.157.612,00	1	Dokumen	692.115.492,60	1	Dokumen	726.721.267,23	1	Dokumen	763.057.330,59	1	Dokumen	801.210.197,12	1	Dokumen	841.270.706,98							
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	1	Dokumen	3.852.073.320,40	1	Dokumen	3.415.133.400,00	1	Dokumen	3.585.890.070,00	1	Dokumen	3.765.184.573,50	1	Dokumen	3.953.443.802,18	1	Dokumen	4.151.115.992,28							
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1	Dokumen	0	Dokumen	-	1	Dokumen	150.000.000,00	1	Dokumen	157.500.000,00	1	Dokumen	165.375.000,00	1	Dokumen	173.643.750,00	1	Dokumen	182.325.937,50							
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	Dokumen	75.328.000,00	1	Dokumen	125.000.000,00	1	Dokumen	131.250.000,00	1	Dokumen	137.812.500,00	1	Dokumen	144.703.125,00	1	Dokumen	151.938.281,25							
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	1	Unit	232.940.741,00	1	Unit	244.587.778,05	1	Unit	256.817.166,95	1	Unit	269.658.025,30	1	Unit	283.140.926,57	1	Unit	297.297.972,89							
Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	1	Dokumen	160.261.709,25	1	Dokumen	170.985.150,00	1	Dokumen	179.534.407,50	1	Dokumen	188.511.127,88	1	Dokumen	197.936.684,27	1	Dokumen	207.833.518,48							
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1	Paket	1	Paket	277.047.000,00	1	Paket	290.899.350,00	1	Paket	305.444.317,50	1	Paket	320.716.533,38	1	Paket	336.752.360,04	1	Paket	353.589.978,05							
Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	Dokumen	1	Dokumen	802.950.898,00	1	Dokumen	550.000.000,00	1	Dokumen	577.500.000,00	1	Dokumen	606.375.000,00	1	Dokumen	636.693.750,00	1	Dokumen	668.528.437,50							
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	0	Keluarga	0	Keluarga	-	44518	Keluarga	249.999.999,50	44518	Keluarga	262.500.000,00	44518	Keluarga	275.625.000,21	44518	Keluarga	289.406.250,23	44518	Keluarga	303.876.562,74							
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	100	%	624.498.711,80	100	%	2.550.000.000,00	100	%	2.677.500.000,00	100	%	2.811.375.000,00	100	%	2.951.943.750,00	100	%	3.099.540.937,50							
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	1	Dokumen	279.254.147,20	1	Dokumen	400.000.000,00	1	Dokumen	420.000.000,00	1	Dokumen	441.000.000,00	1	Dokumen	463.050.000,00	1	Dokumen	486.202.500,00							
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	1	Dokumen	345.244.564,60	1	Dokumen	400.000.000,00	1	Dokumen	420.000.000,00	1	Dokumen	441.000.000,00	1	Dokumen	463.050.000,00	1	Dokumen	486.202.500,00							
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0	Dokumen	0	Dokumen	-	1	Dokumen	300.000.000,00	1	Dokumen	315.000.000,00	1	Dokumen	330.750.000,00	1	Dokumen	347.287.500,00	1	Dokumen	364.651.875,00							

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																KET.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030								
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU							
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)						
(1)	(2)	(3)																				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0	Dokumen	1	Dokumen		1	Dokumen	400.000.000,00	1	Dokumen	420.000.000,00	1	Dokumen	441.000.000,00	1	Dokumen	463.050.000,00	1	Dokumen	486.202.500,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0	Dokumen	1	Dokumen		1	Dokumen	250.000.000,00	1	Dokumen	262.500.000,00	1	Dokumen	275.625.000,00	1	Dokumen	289.406.250,00	1	Dokumen	303.876.562,50	
Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	0	Dokumen	1	Dokumen		1	Dokumen	250.000.000,00	1	Dokumen	262.500.000,00	1	Dokumen	275.625.000,00	1	Dokumen	289.406.250,00	1	Dokumen	303.876.562,50	
Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	0	Dokumen	1	Dokumen		1	Dokumen	550.000.000,00	1	Dokumen	577.500.000,00	1	Dokumen	606.375.000,00	1	Dokumen	636.693.750,00	1	Dokumen	668.528.437,50	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	Persen	100	%	313.469.806,00	100	%	450.000.000,00	100	%	472.500.000,00	100	%	496.125.000,00	100	%	520.931.250,00	100	%	546.977.812,50	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen	1	Dokumen	313.469.806,00	1	Dokumen	450.000.000,00	1	Dokumen	472.500.000,00	1	Dokumen	496.125.000,00	1	Dokumen	520.931.250,00	1	Dokumen	546.977.812,50	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	100	%	1.440.520.739,00	100	%	1.550.000.000,00	100	%	1.662.500.000,00	100	%	1.784.125.000,00	100	%	1.915.681.250,00	100	%	2.058.050.312,50	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	0	Unit	0	Unit	-	1	Unit	150.000.000,00	1	Unit	157.500.000,00	1	Unit	165.375.000,00	1	Unit	173.643.750,00	1	Unit	182.325.937,50	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2	Unit	7	Unit	826.711.598,00	8	Unit	700.000.000,00	9	Unit	770.000.000,00	10	Unit	847.000.000,00	11	Unit	931.700.000,00	12	Unit	1.024.870.000,00	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2	Unit	2	Unit	613.809.141,00	10	Unit	700.000.000,00	12	Unit	735.000.000,00	14	Unit	771.750.000,00	16	Unit	810.337.500,00	18	Unit	850.854.375,00	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kabupaten / Kota yang mencapai Eliminasi Malaria	14,29		14,29	%		14,29	%	350.826.153,76	14,29	%	417.483.122,98	42,86	%	496.804.916,34	57,14	%	521.645.162,16	71,42	%	547.727.420,27	
	Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	13,09		10,09	Per 1000 Penduduk	248.001.349,60	7,98	Per 1000 Penduduk	350.826.153,76	6,31	Per 1000 Penduduk	417.483.122,98	4,81	Per 1000 Penduduk	496.804.916,34	2,73	Per 1000 Penduduk	521.645.162,16	2	Per 1000 Penduduk	547.727.420,27	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	%	100	%	248.001.349,60	100	%	350.826.153,76	100	%	417.483.122,98	100	%	496.804.916,34	100	%	521.645.162,16	100	%	547.727.420,27	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	1	Dokumen	248.001.349,60	1	Dokumen	350.826.153,76	1	Dokumen	417.483.122,98	1	Dokumen	496.804.916,34	1	Dokumen	521.645.162,16	1	Dokumen	547.727.420,27	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan SDMK Sesuai Standar	23,75	%	23,75	%	2.054.075.356,00	29,62	%	1.700.000.000,00	37,03	%	2.300.000.000,00	45,67	%	2.724.703.767,00	58,02	%	3.500.000.000,00	79,01	%	4.800.000.000,00	
	Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	16	Orang	20	Orang	4.992.414.958,80	24	Orang	4.000.000.000,00	28	Orang	4.250.000.000,00	32	Orang	5.000.000.000,00	36	Orang	5.588.125.000,00	40	Orang	6.077.531.250,00	
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	28,57	%	28,57	%		42,85	%		42,85	%		57,14	%		57,14	%		71,42	%		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																KET.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030							
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)					
(1)	(2)	(3)																			
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	0	Persen	100	%	-	100	%	400.000.000,00	100	%	1.400.000.000,00	100	%	2.049.407.533,41	100	%	3.000.000.000,00	100	%	5.000.000.000,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0	Orang	0	Orang	-	2	Orang	200.000.000,00	5	Orang	700.000.000,00	8	Orang	1.024.703.767,00	10	Orang	1.500.000.000,00	15	Orang	2.500.000.000,00
Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	0	Orang	0	Orang	-	2	Orang	200.000.000,00	5	Orang	700.000.000,00	8	Orang	1.024.703.766,41	10	Orang	1.500.000.000,00	15	Orang	2.500.000.000,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	100	Persen	100	%	2.543.410.720,40	100	%	1.800.000.000,00	100	%	2.072.500.000,00	100	%	2.196.125.000,00	100	%	2.520.931.249,76	100	%	2.846.977.812,50
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	10	Orang	10	Orang	2.054.075.356,00	10	Orang	1.500.000.000,00	11	Orang	1.600.000.000,00	12	Orang	1.700.000.000,00	14	Orang	2.000.000.000,00	16	Orang	2.300.000.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	1	Dokumen	489.335.364,40	1	Dokumen	300.000.000,00	1	Dokumen	472.500.000,00	1	Dokumen	496.125.000,00	1	Dokumen	520.931.249,76	1	Dokumen	546.977.812,50
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Provinsi	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua	0	0	100	%	4.992.414.958,80	100	%	4.000.000.000,00	100	%	4.250.000.000,00	100	%	5.000.000.000,00	100	%	5.588.125.000,00	100	%	6.077.531.250,00
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	16	Orang	23	Orang	4.992.414.958,80	25	Orang	4.000.000.000,00	27	Orang	4.250.000.000,00	29	Orang	5.000.000.000,00	31	Orang	5.588.125.000,00	35	Orang	6.077.531.250,00
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	100	Persen	100	%	6.350.400.000,00	100	%	6.567.920.000,00	100	%	6.700.316.000,00	100	%	7.250.381.800,00	100	%	7.718.950.890,00	100	%	8.104.898.434,50
Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	10229	Orang	14000	Orang	6.350.400.000,00	14700	Orang	6.567.920.000,00	15435	Orang	6.700.316.000,00	16206,75	Orang	7.250.381.800,00	17017,09	Orang	7.718.950.890,00	17827,09	Orang	8.104.898.434,50
Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil									960.000.000,00			1.500.000.000,00			2.300.000.000,00			3.180.630.917,00			3.600.000.000,00
Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil		Orang		Orang		5	Orang	960.000.000,00	8	Orang	1.500.000.000,00	10	Orang	2.300.000.000,00	12	Orang	3.180.630.917,00	15	Orang	3.600.000.000,00
Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan									150.000.000,00			200.000.000,00			300.000.000,00			500.000.000,00			1.000.000.000,00
Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia		Orang		Orang		5	Orang	150.000.000,00	8	Orang	200.000.000,00	10	Orang	300.000.000,00	12	Orang	500.000.000,00	15	Orang	1.000.000.000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
Pendayagunaan tenaga							501.498.355,64		976.691.843,21		1.200.000.000,00		1.560.000.000,00		1.807.271.790,55			
Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Orang		Orang		4	Orang	8	Orang	10	Orang	13	Orang	15	Orang	1.807.271.790,55		
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta OAP							200.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		500.000.000,00		800.000.000,00			
Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP	Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan	Dokumen		Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	800.000.000,00		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	N.A	%	100	%	213.829.189,00	100	%	224.520.648,45	100	%	250.771.610,12	100	%	263.310.190,62	100	%	276.475.700,15
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	100	%	100	%	213.829.189,00	100	%	224.520.648,45	100	%	250.771.610,12	100	%	263.310.190,62	100	%	276.475.700,15
	Persentase Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	0	%	100	%	276.511.437,80	100	%	364.563.405,36	100	%	401.931.154,41	100	%	422.027.712,13	100	%	443.129.097,74
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjuti Penerbitan Perizinan	1	Sarana	3	Sarana	213.829.189,00	3	Sarana	224.520.648,45	3	Sarana	250.771.610,12	3	Sarana	263.310.190,62	3	Sarana	276.475.700,15
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100	Persen	100	%	62.682.248,80	100	%	140.042.756,91	100	%	151.159.544,29	100	%	158.717.521,51	100	%	166.653.397,58
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	1	Sarana	1	Sarana	62.682.248,80	1	Sarana	140.042.756,91	1	Sarana	151.159.544,29	1	Sarana	158.717.521,51	1	Sarana	166.653.397,58
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	3	Kabupaten	3	Kabupaten	293.430.556,90	4	Kabupaten	822.453.059,66	4	Kabupaten	906.754.498,28	6	Kabupaten	952.092.223,19	7	Kabupaten	728.140.896,85
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	100	%	293.430.556,90	100	%	150.000.000,00	100	%	213.004.498,28	100	%	205.504.723,19	100	%	195.814.959,35
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	Dokumen	1	Dokumen	293.430.556,90	1	Dokumen	150.000.000,00	1	Dokumen	213.004.498,28	1	Dokumen	205.504.723,19	1	Dokumen	195.814.959,35
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	100	%	-	100	%	300.000.000,00	100	%	330.750.000,00	100	%	347.287.500,00	100	%	182.325.937,50
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	1	Dokumen	-	1	Dokumen	150.000.000,00	0	Dokumen	165.375.000,00	1	Dokumen	173.643.750,00	0	Dokumen	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																KET.								
				2025				2026				2027				2028					2029				2030			
				TARGET		PAGU		TARGET		PAGU		TARGET		PAGU		TARGET		PAGU			TARGET		PAGU					
				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)											
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	Dokumen	1	Dokumen	-	1	Dokumen	150.000.000,00	1	Dokumen	157.500.000,00	1	Dokumen	165.375.000,00	1	Dokumen	173.643.750,00	1	Dokumen	182.325.937,50							
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	100	%		100	%	372.453.059,66	100	%	300.000.000,00	100	%	363.000.000,00	100	%	399.300.000,00	100	%	350.000.000,00							
Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	Dokumen	1	Dokumen	489.858.071,35	1	Dokumen	372.453.059,66	1	Dokumen	300.000.000,00	1	Dokumen	363.000.000,00	1	Dokumen	399.300.000,00	1	Dokumen	350.000.000,00							
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi									-			256.075.712,65			-			-			271.555.937,50							
	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan		Dokumen		Dokumen		0	Dokumen	-	1	Dokumen	256.075.712,65	0	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen	271.555.937,50							
PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Kab/kota dengan RS Pemerintah Terakreditasi Paripurna	71,42	%	71,42	%	-	71,42	%	519.750.000,00	71,42	%	545.737.500,00	85,71	%	573.024.375,00	100	%	601.675.593,75	100	%	631.759.373,44							
Penyelenggaraan Akreditasi pada Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Lain, serta Rumah Sakit Baik Milik Pemerintah Daerah maupun Swasta	Persentase Rumah Sakit terakreditasi paripurna	67	%	67	%	-	67	%	519.750.000,00	67	%	545.737.500,00	75	%	573.024.375,00	75	%	601.675.593,75	75	%	631.759.373,44							
	Persentase Puskesmas terakreditasi	91,35	%	96,29	%		96,29	%		97,53	%		97,53	%		97,53	%		97,53	%								
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	0	Unit	2	Unit		3	Unit	204.750.000,00	5	Unit	214.987.500,00	8	Unit	225.736.875,00	11	Unit	237.023.718,75	11	Unit	248.874.904,69							
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	0	Unit	2	Unit		3	Unit	157.500.000,00	5	Unit	165.375.000,00	8	Unit	173.643.750,00	11	Unit	182.325.937,50	11	Unit	191.442.234,38							
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	0	Unit	2	Unit		3	Unit	157.500.000,00	5	Unit	165.375.000,00	8	Unit	173.643.750,00	11	Unit	182.325.937,50	11	Unit	191.442.234,38							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA TESEHATAN	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	24,6	%	22,6	%		20,26	%		18,16	%		16,29	%		14,6	%		13,09	%								
	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (Terkait Penurunan Prevalensi Stunting)	100	%	100	%	2.972.941.917,80	100	%	3.126.687.538,61	100	%	3.720.758.170,95	100	%	4.427.702.223,43	100	%	4.649.087.334,60	100	%	4.881.541.701,33							
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	%	100	%	2.972.941.917,80	100	%	3.126.687.538,61	100	%	3.720.758.170,95	100	%	4.427.702.223,43	100	%	4.649.087.334,60	100	%	4.881.541.701,33							
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masvarakat	1	Dokumen	1	Dokumen	2.972.941.917,80	1	Dokumen	3.126.687.538,61	1	Dokumen	3.720.758.170,95	1	Dokumen	4.427.702.223,43	1	Dokumen	4.649.087.334,60	1	Dokumen	4.881.541.701,33							

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																		KET.						
				2025				2026				2027				2028				2029				2030				
				TARGET		PAGU		TARGET		PAGU		TARGET		PAGU		TARGET		PAGU		TARGET			PAGU					
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)												
(1)	(2)	(3)	Tahun																									
	Usia Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua	N.A	Tahun	60	Tahun		65,55	Tahun		66,11	Tahun		66,68	Tahun		67,25	Tahun		67,82	Tahun								
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Penduduk OAP yang menerima Pelayanan Program Papua Sehat	N.A	Orang	3315	Orang		3500	Orang		4000	Orang		4500	Orang		5000	Orang		5500	Orang								
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	0	%	100	%	50.000.000.000,00	100	%	52.500.000.000,00	100	%	62.475.000.000,00	100	%	74.345.250.000,00	100	%	88.470.847.500,00	100	%	105.280.308.525,00							
Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	0	Orang	3315	Orang	50.000.000.000,00	3500	Orang	52.500.000.000,00	4000	Orang	62.475.000.000,00	4500	Orang	74.345.250.000,00	5000	Orang	88.470.847.500,00	5500	Orang	105.280.308.525,00							

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial				
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	(Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 1) dalam RPJMD 2025-2029 (Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 1) dalam RPJMD 2025-2029 dan Prioritas Rakortek Tahun 2025 (Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 1) dalam RPJMD 2025-2029 (Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 1) dalam RPJMD 2025-2029 (Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 5) dalam RPJMD 2025-2029 dan Prioritas Rakortek Tahun 2025 (Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 5) dalam RPJMD 2025-2029 dan Prioritas Rakortek Tahun 2025 (Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 7) dalam RPJMD 2025-2029 dan Prioritas Rakortek Tahun 2025 (Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 7) dalam RPJMD 2025-2029 (Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 7) dalam RPJMD 2025-2029 (Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 9) dalam RPJMD 2025-2029 dan Prioritas Rakortek Tahun 2025 (Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 8) dalam RPJMD 2025-2029 (Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 9) dalam RPJMD 2025-2029 (Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 9) dalam RPJMD 2025-2029 (Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 9) dalam RPJMD 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	(Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 9) dalam RPJMD 2025-2029
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	(Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 9) dalam RPJMD 2025-2029
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	(Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 9) dalam RPJMD 2025-2029
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat dalam penanganan Stunting	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	(Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 3) dalam RPJMD 2025-2029
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat dalam penanganan Malaria	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	(Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 9) dalam RPJMD 2025-2029
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	(Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 2 dan 4) dalam RPJMD 2025-2029
			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	(Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 2 dan 4) dalam RPJMD 2025-2029
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	(Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 6) dalam RPJMD 2025-2029
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Provinsi	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	(Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 6) dalam RPJMD 2025-2029
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas mutu dan layanan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	(Program prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 1) dalam RPJMD 2025-2029
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	
			Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	(Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 1) dalam RPJMD 2025-2029
			Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	
			Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	(Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 7) dalam RPJMD 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5	PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Penyelenggaraan Akreditasi pada Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Lain, serta Rumah Sakit Baik Milik Pemerintah Daerah maupun Swasta	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	(Program Prioritas-1) Akselerasi akses dan mutu kesehatan (Kegiatan Prioritas 5) dalam RPJMD 2025-2029 dan Prioritas Rakortek Tahun 2025
Misi 7 : Optimalisasi Otonomi khusus untuk menyejahterakan Orang Asli Papua				
1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Orang Asli Papua	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	
			Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	(Program Prioritas-19) Kartu Papua Barat Sehat dan Pintar (Kegiatan Prioritas 78 Kartu Papua Sehat) dalam RPJMD 2025-2029

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab III Renstra. Selain IKU perangkat daerah juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, rencana pencapaian kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat diupayakan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029. Kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. IKU dan IKK disajikan secara rinci pada tabel 4.4 dan 4.5.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,45	69,79	70,13	70,47	70,81	71,16
2	Prevalensi Stunting	Persentase	22,6	20,26	18,16	16,29	14,6	13,09
3	Persentase Kabupaten / Kota yang mencapai Eliminasi Malaria	Persentase	14,29	14,29	14,29	42,86	57,14	71,42
4	Usia Harapan Hidup Orang Asli Papua	Tahun	60	65,55	66,11	66,68	67,25	67,82
5	Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas	Persentase	82,95	91,24	100	100	100	100
6	Persentase Balita Gizi Buruk	Persentase	9	7,8	7,6	7,4	7,2	7
7	Persentase Kabupaten / Kota yang mencapai API < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	14,28	28,57	28,57	57,14	71,43	85,71
8	Rasio Tenaga Medis Tenaga Kesehatan terhadap Populasi	Per 1000 Penduduk	10,92	11,02	11,36	11,9	12,44	12,5
9	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persentase	71,42	71,42	71,42	85,71	100	100
10	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase	57,14	71,42	71,42	85,71	100	100
11	Persentase Kab/Kota dengan RS Pemerintah Terakreditasi Paripurna	Persentase	71,42	71,42	71,42	85,71	100	100
12	Cakupan Kartu Papua Sehat	Persentase	50	60	70	80	90	100
13	Nilai LAKIP	Kategori	B	B	B	B	B	B

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT : 1000 Penduduk	1,8 : 1000	1,9 : 1000	2.0 : 1000	2.1 : 1000	2.2 : 1000	2.3 : 1000
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persentase	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persentase	100	100	100	100	100	100
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000 kelahiran hidup	158	145	133	122	112	102
6	Angka Kematian Balita per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000 kelahiran hidup	36,74	34,64	32,54	30,44	28,34	26,24
7	Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persentase	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persentase	98,6	98,7	98,8	98,9	99	99,1
9	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persentase	95	95	95	95	95	95
10	Angka keberhasilan Pengobatan kasus TBC (success rate)	Persentase	85	85	85	85	85	85
11	Positive Rate HIV	Persentase	2,21	2,15	2,09	2,03	1,96	1,5
12	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persentase	90	91	92	93	94	95
13	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Persentase	14,46	20,25	28,35	39,68	55,56	60,55
14	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persentase	20	30	40	60	80	80
15	Persentase jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer	Persentase	10	20	40	60	80	100
16	Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	10,09	7,98	6,31	4,81	2,73	2
17	Persentase hipertensi dalam pengendalian	Persentase	25	30	35	40	45	50
18	Prevalensi obesitas > 18 Tahun	Persentase	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
19	Persentase merokok penduduk 10-21 Tahun	Persentase	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
20	Persentase Diabetes dalam pengendalian	Persentase	10	12	14	16	25	25

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	Prevalensi Depresi pada usia > 15 Tahun	Persentase	1	1	1	1	1	1
22	Jumlah Pelayanan Kesehatan bergerak yang dilaksanakan di kampung	Layanan	3	4	4	8	8	8
23	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kab/Kota	1	1	2	2	3	4
24	Persentase Kabupaten/kota mencapai target STBM	Kab/Kota	14.29	28.58	42.86	57.14	71.43	85.71
25	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persentase	10	20	30	40	50	60
26	Persentase kab/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	40	50	60	70	80	90
27	Kabupaten/Kota dengan eliminasi kusta	Kab/Kota	1	1	2	3	5	6
28	Persentase Kab/kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	Persentase	40	50	60	70	80	90
29	Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	Persentase	40	45	50	55	60	65
30	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Persentase	100	100	100	100	100	100
31	Persentase Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	Persentase	100	100	100	100	100	100
32	Persentase Puskesmas dengan SDM Sesuai Standar	Persentase	23.75	29.62	37.03	45.67	58.02	79.01
33	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	28.57	42.85	42.85	57.14	57.14	71.42
34	Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	Orang	20	24	28	32	36	40
35	Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kab/Kota	3	4	4	5	6	7
36	Persentase Rumah Sakit terakreditasi paripurna	Persentase	67	67	67	75	75	75
37	Persentase Puskesmas terakreditasi	Persentase	96.29	96.29	97.53	97.53	97.53	97.53
38	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	Persentase	100	100	100	100	100	100
39	Jumlah Penduduk OAP yang menerima Pelayanan Program Papua Sehat	Orang	3315	3500	4000	4500	5000	5500
40	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

5.1. KAIDAH PELAKSANAAN DAN PENGEDALIAN EVALUASI

Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan, yang dalam implementasinya selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan dinamika perubahan social budaya, ekonomi, dan lingkungan yang berlangsung secara cepat. Demikian juga halnya dengan RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang telah disusun hendaknya bersifat fleksibel dan dinamis (dapat berubah sewaktu-waktu) sesuai dengan kondisi obyektif yang berkembang, untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika pembangunan secara keseluruhan.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan misi dan pencapaian visi Pembangunan Papua Barat. Hal- hal yang berkembang, terakomodir dan kemudian menjadi isu pokok baru, agar segera diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum koordinasi penyusunan dan pemantapan program Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk melakukan perbaikan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029 disusun untuk dapat dijadikan acuan, baik dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) maupun dalam melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor, yang dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka di tetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dibidang urusan kesehatan berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RENSTRA Dinas



Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi sumber daya perangkat daerah.

2. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025 – 2029.
3. RENSTRA merupakan pedoman dalam penyusunan Renja perangkat daerah, oleh karena itu seluruh unit perangkat daerah di dalam lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat berkewajiban menyusun rencana kerja unit perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kegiatan unit perangkat daerah setiap tahun dengan berpedoman pada RENSTRA untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program kegiatan beserta pendanaan.
4. Penjabaran lebih lanjut RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025 – 2029 untuk setiap tahunnya dilakukan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dilakukan secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan guna memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan, tujuan strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Pengendalian pelaksanaan Renstra dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahunan, baik secara administratif maupun substantif. Pengendalian ini dilaksanakan dengan mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah, serta indikator kinerja program dan kegiatan (IKK) yang terukur dan dapat dipantau melalui sistem pelaporan kinerja berbasis aplikasi e-SAKIP. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan secara berkala dalam bentuk evaluasi



tahunan (melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – LKjIP) dan evaluasi tengah dan akhir periode Renstra.

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian hasil, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan terhadap strategi dan kebijakan pelayanan kesehatan.

Seluruh hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar dalam melakukan revisi strategi, penyesuaian target dan peningkatan efisiensi serta efektivitas pelayanan publik. Evaluasi juga menjadi alat ukur akuntabilitas dan transparansi kinerja, sejalan dengan prinsip good governance dan semangat reformasi birokrasi.

Dengan pendekatan evaluasi yang adaptif, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas demi mendukung pencapaian pembangunan daerah yang adil dan merata.



**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT
2025**